



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
TAHUN 2005 – 2025**

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara  
Langgur, Oktober 2009

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara ini disusun secara terencana, bertahap dan sistematis berdasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025 lebih berorientasi pada tindakan antisipatif, mengikuti kecenderungan perubahan lingkungan strategis yang terus terjadi, serta yang terpenting adalah lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis.

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan interpretasi dan agregasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Maluku Tenggara untuk 20 tahun kedepan dimana proses penyusunannya dilakukan melalui proses politik, teknokratik, partisipasif, proses *bottom up* dan *top down* serta proses regulatif ketika dibahas dan ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Peraturan Daerah.

Diharapkan dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman bagi kita semua, seluruh jajaran pemerintah daerah, masyarakat dan *stake holders* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik ke depan, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita.

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan pikiran-pikiran dan tenaganya sehingga tersusunya dokumen ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala bentuk pengabdian kita.

Maluku Tenggara Oktober 2009.



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 12      Tahun : 2009      Seri : D      Nomor : 12

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025;
  - b. bahwa dengan memperhatikan sungguh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, maka walaupun RPJPD Provinsi Maluku belum ada tetapi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dapat ditetapkan;
  - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan jangka panjang daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri E).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
DAN  
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN  
2005-2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005-2025

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KONDISI UMUM DAERAH  
BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 2005-2025  
BAB IV : SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH.  
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, tertuang dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

## Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan oleh Bupati.


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur  
pada tanggal            Oktober 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal            Oktober 2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



**PETRUS BERUATWARIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009    NOMOR 12  
SERI D



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang menjadi urusan Pemerintah, dimana Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah serta yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut, maka perencanaan daerah yang adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan serta dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia merupakan salah satu aspek penting dan strategis dengan tujuan untuk ; mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini adalah dokumen perencanaan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan

daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2025 serta merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai amanah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara yang dilandasi oleh kuatnya komitmen seluruh komponen masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 disusun secara terencana, bertahap dan sistimatis berdasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan daerah dengan lebih berorientasi pada tindakan antisipatif, mengikuti kecenderungan perubahan lingkungan strategis yang terus terjadi serta yang terpenting adalah lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis.

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan interpretasi dan agregasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Maluku Tenggara untuk 20 tahun kedepan. Penyusunan RPJP dilakukan melalui proses politik, teknokratik, partisipasif, serta proses *bottom up* dan *top down*. Dengan demikian dokumen perencanaan yang disusun ini merupakan kesepakatan bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten secara hirarkis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, RPJMN dan RPJMD Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 137

## DAFTAR ISI

|  | Hal       |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....   | i         |
| DAFTAR ISI .....   | ii        |
| <b>BAB. 1</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.2. Pengertian .....  | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 3         |
| 1.4. Landasan Hukum .....  | 3         |
| 1.5. Hubungan RPJPD dengan Dokumen<br>Perencanaan Lainnya .....  | 4         |
| 1.6. Sistimatika Penulisan .....   | 5         |
| <b>BAB. 2</b> <b>KONDISI UMUM DAERAH</b> .....   | <b>6</b>  |
| 2.1. Kondisi dan Hasil Pembangunan .....   | 6         |
| 2.2. Tantangan .....   | 25        |
| 2.3. Nilai-Nilai Strategis Kabupaten<br>Maluku Tenggara .....  | 38        |
| <b>BAB. 3</b> <b>VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH</b><br>2005 - 2025 .....   | <b>40</b> |
| 5.1. Visi .....  | 40        |
| 5.2. Misi .....  | 41        |
| <b>BAB. 4</b> <b>SASARAN, ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS</b><br><b>PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH</b><br><b>TAHUN 2005 -2025</b> ..... | <b>43</b> |
| 4.1. Sasaran Pembangunan Jangka<br>Panjang .....   | 43        |
| 4.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang<br>Kabupaten Maluku Tenggara .....  | 48        |
| 4.3. Tahapan dan Skala Prioritas<br>Pembangunan 2005 - 2025 .....  | 60        |
| <b>BAB. 5</b> <b>PENUTUP</b> .....   | <b>65</b> |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan panjang dan merupakan bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa yang memiliki nilai strategis. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku terbagi atas 2 (dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Maluku Selatan. Semenjak diberlakukannya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Daerah Maluku menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur. Kondisi ini memungkinkan munculnya semangat separatisme daerah termasuk di Provinsi Maluku, yang mencapai puncaknya pada tanggal 25 April 1950 ketika diproklamkan Republik Maluku Selatan (RMS) yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) yang beranggotakan 30 orang dan 8 orang diantaranya dari Kabupaten Maluku Tenggara yang mempunyai komposisi keterwakilan 26, Persen dari jumlah kursi yang ada.

Separatisme RMS yang mengklaim daerah Maluku Tenggara sebagai wilayahnya, ditentang dengan keras oleh Toko Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh-tokoh Pemuda Maluku Tenggara. Bersamaan dengan itu pada Bulan April 1951 direncanakan rapat DMS oleh Gubernur Maluku dimana ke-8 anggota asal Maluku Tenggara juga diundang. Dalam pelaksanaannya ternyata bahwa rapat tersebut tidak dapat terselenggara disebabkan oleh keadaan politik Provinsi Maluku yang tidak menentu pada saat itu.

Momentum tersebut kemudian digunakan oleh Anggota DMS asal Maluku Tenggara untuk menyampaikan sebuah resolusi politik yang isinya antara lain :

- (1) Menentang dengan tegas pencaplokan Daerah Maluku Tenggara, meliputi : Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Selatan Daya (Leti, Moa, Lakor, Kisar) sebagai bagian dari Wilayah RMS;
- (2) Mengusulkan pembentukan daerah otonom Maluku Tenggara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Meminta perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara yang pada waktu itu sangat tertinggal dengan daerah lain di Provinsi Maluku terutama dalam hektar! pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.

Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, akhirnya keinginan politik tokoh adat dan tokoh masyarakat Maluku Tenggara tersebut kemudian direspons oleh pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah Swatantra Tingkat I Maluku. Proses pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ketika dilaksanakan pelantikan DPRDS sekaligus pembukaan sidang perdana pada tanggal 22 Desember 1952 di Tual.

Untuk mewujudkan amanah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara tersebut, maka pembangunan daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah suatu keharusan yang dilandasi oleh kuatnya komitmen seluruh komponen masyarakat Maluku Tenggara. Atas dasar pemikiran seperti itu maka pembangunan di Maluku Tenggara untuk setiap tahapnya perlu dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025 disusun secara terencana, bertahap dan sistematis berdasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025 lebih berorientasi pada tindakan antisipatif, mengikuti kecenderungan perubahan lingkungan strategis yang terus terjadi, serta yang terpenting adalah lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis.

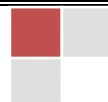
RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan interpretasi dan agregasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Maluku Tenggara untuk 20 tahun kedepan. Penyusunan RPJP dilakukan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, serta proses *bottom up* dan *top down*. Dengan demikian dokumen perencanaan yang disusun ini merupakan kesepakatan bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

## 1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup murun waktu tahun 2005 hingga tahun 2025.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025, selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan 20



Tahunan yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen Daerah, (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) tentang visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

#### 1.4. Landasan Hukum

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 didasarkan pada :

- (1) Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

#### 1.5. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Maluku Tenggara. Dokumen ini disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN) yang berfungsi mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan bagi segenap pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah dan DPRD, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat) guna meningkatkan keserasian dalam pembangunan.

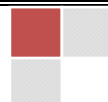
Dokumen RPJPD (20 tahun) ini berisikan kondisi umum, visi dan misi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang, sedangkan dokumen RPJM (5 Tahun) disesuaikan dengan masa waktu Kepala Daerah Terpilih, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan Kepala Daerah.

Sebagai penjabaran RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis SKPD, berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program-program serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Renstra SKPD dijabarkan untuk program tahunan yang disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Renja SKPD yang disusun berdasarkan hektarsil Forum SKPD dan MUSRENBANG Kabupaten dirangkum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan prioritas pembangunan daerah, rencana ekonomi makro daerah, arah dan kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

|     |     |   |
|-----|-----|---|
| Bab | I   | Pendahuluan   |
| Bab | II  | Kondisi Umum Daerah   |
| Bab | III | Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 - 2025                                      |
| Bab | IV  | Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 -2025 |
| Bab | V   | Penutup   |





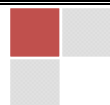
## **2.1. KONDISI DAN HASIL PEMBANGUNAN**

### **A. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup**

1. Kabupaten Maluku Tenggara secara geografis terletak pada koordinat  $131^{\circ} - 133^{\circ} 5'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 32' - 8^{\circ} 00'$  Lintang Selatan, secara administrasi Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan :
  - (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tual dan Provinsi Papua Bagian Selatan;
  - (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
  - (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Tual, Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar;
  - (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Aru.

Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara kurang lebih 3.883 kilometer persegi dengan luas lautnya kurang lebih 7,6 kali dan luas daratannya, terdiri atas Gugusan Kepulauan Kei Kecil dengan luas seluruhnya 2.468 kilometer persegi dan Pulau Kei Besar dengan luas 581 kilometer persegi. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kei Kecil 224,25 kilometer persegi, Kecamatan Kei Besar 202,20 kilometer persegi, Kecamatan Kei Besar Selatan 191,40 kilometer persegi, Kecamatan Kei Kecil Barat 123 kilometer persegi, Kecamatan Kei Besar Utara Timur 83,07 kilometer persegi,

2. Secara Topografi Pulau Kei Kecil lebih datar dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Beberapa Bukit Rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 meter dengan Gunung Dab sebagai Puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai. Desa-Desa pada umumnya tersebar pada ketinggian 0-100 m. Sebaran rata-rata kedalaman (4 mil dari garis pantai) di Kei Kecil (Nuhu Roe) adalah  $\leq 100$  m atau rata-rata slop  $\leq 1,5$  persen yaitu di Pulau Kei Kecil Bagian Barat. Sebaran rata-rata kedalaman di Pulau Kei Besar (Nuhu Yut),  $\leq 100$  m berada di bagian Barat Laut, sedangkan bagian Barat daya dan bagian Timur kedalaman rata-rata lebih dari 300 m. Kemiringan Daratan Pulau (Island Flat) di Pulau Kei Kecil berkisar antara 0 persen - 40 persen, sedangkan untuk Pulau Kei Besar kemiringan Daratan Pulau adalah Curam (15 persen - 40 persen) sampai dengan sangat curam ( $> 40$  persen).
3. Berdasarkan Peta Geologi Indonesia (1965), Pulau/Kepulauan Maluku Tenggara terbentuk/ tersusun dari jenis tanah meliputi Podzolik, Rensina dan Lithosol sedangkan jenis batuan meliputi Aluvium Undak, Terumbu Coral, Seklis Hebluk, Paleogen dan Ulagan Paleozoikum. Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudra Indonesia juga



dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

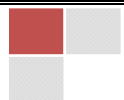
4. Kabupaten Maluku Tenggara yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara, jo Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, saat ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya serta perubahan-perubahan lingkungan stratejik, sejalan dengan telah terjadinya 3 (tiga) kali pemekaran daerah dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, masing-masing sebagaimana diatur dengan Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Kepulauan Aru; dan Undang Undang 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara saat ini terdiri dari 6 Kecamatan, 87 Desa, 1 Kelurahan, dan 102 Dusun.
5. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan 1 dari 12 gugus pulau yang ada di provinsi Maluku, yaitu Gugus Kepulauan Kei dengan jumlah pulau sebanyak 108 pulau, 88 pulau diantaranya berpenghuni/ada usaha dan 20 pulau tidak berpenghuni. Jumlah pulau yang sedemikian itu memiliki potensi SDA yang cukup besar, baik itu potensi perikanan, kelautan, dan potensi wisata bahari. Kondisi sosial ekonomi desa-desa yang terletak di pulau-pulau kecil umumnya masih tertinggal dibandingkan dengan desa-desa di pulau-pulau besar dan letaknya berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan. Permasalahan ketertinggalan ini terutama disebabkan kesulitan akses transportasi yang banyak dipengaruhi oleh keterbatasan sarana transportasi dan keadaan iklim/cuaca pada waktu-waktu tertentu.
6. Penggunaan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2004 terdiri dari permukiman, tegalan, kebun campuran, hutan, perusahaan, jasa, industri dan penggunaan lainnya. Sebaran permukiman sekitar 34 persen, tegalan 0,07 persen, hutan produktif 1,35 persen, hutan sekunder 50,67 persen, hutan masyarakat 1,35 Persen, tanah terbuka 5,20 persen serta penggunaan lainnya 6,45 persen.
7. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah Kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil memiliki ciri utama yaitu keterbatasan cadangan air tawar termasuk cadangan air tanah. Hal ini disebabkan karena kecilnya daerah tangkapan hujan dan struktur geologi yang kurang mendukung, peka dan rentan terhadap tekanan dari pengaruh eksternal baik alami maupun kegiatan manusia. Tingkat kerusakan hutan masih cukup tinggi dengan ancaman terbesar adalah kekeringan dan bahaya kebakaran, yang antara lain disebabkan karena pengelolaan hasil hutan yang tidak memperhitungkan daya dukung

lingkungan dan pembukaan lahan yang berpindah-pindah. Dalam hal pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan masih dijumpai kegiatan-kegiatan illegal fishing dan cara-cara destruktif seperti penggunaan penyedotan ikan (*fish pump*) bom, potesium dan lain-lain.

8. Secara geologis Kepulauan Maluku Tenggara berada tepat diatas pertemuan lempengan besar Eurasia dibarat, dengan lempeng Sercum Fasifik dari timur dan lempeng Indo-Australia dari selatan dengan pergerakan kerak bumi 6 cm per tahun, sehingga rawan terhadap bencana yang disebabkan karena gempa tektonik dengan ancaman tsunami yang sangat potensial. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu 1600-2000, telah terjadi 32 tsunami 28 diantaranya disebabkan oleh gempa tektonik dan 4 oleh gunung api bawah laut. Oleh sebab itu pembangunan daerah yang berbasis mitigasi bencana merupakan pilihan yang bijaksana untuk mensiasati ancaman bencana, termasuk didalamnya persiapan masyarakat untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin timbul.

## B. Demografi

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1980 sebanyak 244.933 jiwa (sebelum pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat), tahun 1995 sebanyak 311.247 jiwa (sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru, pada tahun 2004 (sesudah pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru) sebanyak 144.220 jiwa, dan pada tahun 2007 (sesudah pemekaran kota Tual) sebanyak 99.079 jiwa. Pada tahun 2004 laju pertambahan penduduk 5,05 persen, Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 6,26 persen disebabkan terjadinya arus pengungsi sebagai akibat konflik sosial di Maluku, sedangkan laju pertumbuhan rata-tara 1990-2000 sebesar 1,30 persen.
2. Struktur Penduduk menurut Ketenagakerjaan dapat digambarkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2005 sebanyak 60.611 orang\*). Aktivitas penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar pada bidang pertanian, pertambangan dan galian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, jasa, dan lainnya. Aktifitas penduduk yang dominan pada jenis pekerjaan pertanian yaitu sebesar 66,67 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2004 sebesar 72,73 persen\*) hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan lapangan kerja yang cukup untuk menampung banyaknya penduduk usia kerja pada setiap tahunnya.
3. Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2004 sebanyak 10.172 PUS, meningkat rata-rata per-tahun sebesar 20.5 persen. Jumlah Peserta KB Aktif sampai dengan tahun 2004 sebanyak 8.119 peserta, sedangkan Peserta KB Baru sebanyak 112. Proporsi terbanyak Peserta Aktif berdasarkan metode kontrasepsi adalah metode suntikan sebesar 77 Persen dan metode pil 31 Persen peserta.



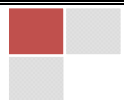
Pada tahun 2007 sebanyak 18.301 PUS, meningkat rata-rata per-tahun sebesar 20,5 persen. Jumlah Peserta KB Aktif sampai dengan tahun 2007 sebanyak 7.439 peserta, sedangkan Peserta KB Baru sebanyak 2.144. Proporsi terbanyak Peserta Aktif berdasarkan metode kontrasepsi adalah metode suntikan sebesar 40,97 persen, metode kondom 21,25 persen dan metode pil 20,59 persen peserta.

4. Penanggulangan kemiskinan merupakan persoalan yang tidak semata didekati melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga memerlukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu perluasan akses terhadap terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrasrtuktur dasar, serta kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha dengan fokus utama pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan rata-rata 11,96 Persen. Pada tahun 2004 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 78.196 jiwa, atau sekitar 54,22 Persen dari jumlah penduduk Maluku Tenggara. Pada tahun 2007 setelah pemekaran Kota Tual tercatat jumlah penduduk miskin Maluku Tenggara sebesar 16.986 jiwa, atau sekitar 38,67 Persen dari jumlah penduduk Maluku Tenggara.

### C. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Krisis ekonomi yang terjadi secara nasional dan pertikaian antar kelompok di Maluku sangat berpengaruh bagi kondisi ekonomi Maluku Tenggara seperti halnya daerah lain di Maluku. Pada era tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara\*) mencapai titik terendah dari sebelumnya diatas 10% menjadi rata-rata sekitar 3% selama periode 2000 - 2004. Struktur ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2000 sampai dengan 2004 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Kegiatan ekonomi pada sektor primer, sekunder dan tersier yang memberi nilai tambah (*value edded*) bergerak berfluktuasi setiap tahunnya. Kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan, dengan sub sektor perikanan sebagai andalannya) dalam PDRB Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2000 sebesar 24,10 persen menjadi hanya 7,15 persen pada tahun 2004, sektor sekunder (industri, listrik-gas-air bersih, dan bangunan) pada tahun 2000 sebesar 23.53 persen menjadi 15,45 persen pada tahun 2004, dan sektor tersier (perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa) sebesar 42,12 persen pada tahun 2000 menjadi 20.62 persen pada tahun 2004.

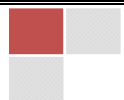
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar harga Berlaku pada tahun 2000 tercatat sebesar 365.746,00 juta rupiah, pada tahun 2001 sebesar 425.876,32 juta rupiah, pada tahun 2002 sebesar 507.878,19 juta rupiah, pada tahun 2003 sebesar 347.401,85 juta rupiah, dan pada tahun 2004 sebesar 386.344,87 juta rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar harga Konstan pada tahun 2000 sebesar 174.681,70 juta



rupiah, pada tahun 2001 sebesar 183.181,25 pada tahun 2002 sebesar 123.918,96 juta rupiah, pada tahun 2003 sebesar 128.054,73 juta rupiah, dan pada tahun 2004 sebesar 278.999,02 juta rupiah.

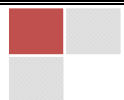
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2000 s/d tahun 2004 tercatat rata-rata sebesar 3,89 persen. Besaran angka pertumbuhan tersebut dibentuk oleh peran sektor-sektor didalamnya. Pada Tahun 2000 peranan Sektor pertanian rata-rata sebesar 7,01 persen, pertambangan dan penggalian rata-rata sebesar 3,95 persen, industri pengolahan rata-rata 3,00 persen, Listrik dan Air Bersih rata-rata sebesar 7,50 persen, bangunan/konstruksi rata-rata 6,80 persen, perdagangan, hotel dan restoran rata-rata 6,51 persen, pengangkutan dan komunikasi rata-rata 4,54 persen, keuangan, persewaan dan jasa rata-rata 4,58 persen, dan jasa-jasa 3,83 persen.

2. Penerimaan keuangan daerah yang pada tahun 1996/1997 tercatat Rp.45.76 miliar tahun 1999/2000 meningkat menjadi Rp.74.87 miliar dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 267.95 miliar. Dari jumlah penerimaan keuangan daerah tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 1996/1997 sebesar 4,15 persen, tahun 1999/2000 sebesar 2,69 persen dan pada tahun 2004 sebesar 17,43 persen. Tantangan bidang keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah melalui Dana Perimbangan masih tinggi, karena sampai dengan tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah baru memberikan kontribusi sebesar 17,43 Persen dari total anggaran. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2000 s/d 2004 terus menunjukkan angka peningkatan. Jika pada tahun 2000 PAD Maluku Tenggara tercatat Rp. 2.08 miliar pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 3.81 miliar, tahun 2002 menjadi Rp. 7.48 miliar tahun 2003 sebesar Rp. 8.94 miliar dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 10.72 miliar.
3. Lembaga Keuangan Bank di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2004 terdiri dari Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia dengan 2 (dua) Cabang Pembantu, Kantor Cabang Bank Maluku dengan 1 (satu) Cabang, Kantor Cabang Bank (BPR) Modern, Kantor Bank (BPR) Artha Graha, dan Kantor Cabang Pembantu BNI. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga keuangan non Bank seperti Penggadaian, Jasa Asuransi, Badan Usaha Kredit dan lain-lain, yang ternyata turut membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Simpanan masyarakat di lembaga keuangan pada tahun 2000 sebesar Rp. 118.87 miliar terdiri dari giro sebesar Rp. 29.31 miliar, deposito Rp. 13.25 miliar dan tabungan sebesar Rp. 76.29 miliar. Pada tahun 2004 simpanan masyarakat meningkat menjadi Rp. 332.84 miliar atau rata-rata 32,85 persen per tahun, dengan rincian giro Rp. 79.35 miliar atau meningkat rata-rata 34,74 persen, deposito Rp. 71.71 miliar atau meningkat rata-rata 135,71 persen, dan tabungan Rp. 181.77 miliar atau meningkat rata-rata 207,06 persen. Kredit yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2000 sebesar Rp. 26.08 miliar terdiri dari kredit modal kerja Rp. 6.43 miliar kredit investasi sebesar Rp. 1.42 miliar dan kredit konsumsi



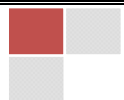
sebesar Rp 18.23 miliar. Pada tahun 2004 pemberian kredit kepada masyarakat meningkat menjadi Rp. 99.42 miliar atau rata-rata 41,11 persen per tahun, terdiri dari kredit modal kerja Rp. 22.12 miliar atau meningkat rata-rata 39,38 persen, kredit investasi Rp. 3.42 miliar atau meningkat rata-rata 2.376,19 persen, dan kredit konsumsi Rp. 73.88 miliar atau meningkat rata-rata 44,17 persen.

4. Pada tahun 2000, jumlah koperasi di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 145 unit, meliputi koperasi produksi 12 unit, Koperasi Konsumsi 42 unit, Koperasi Simpan Pinjam 6 unit, Koperasi Serba Usaha 85 unit, dengan modal sendiri sebesar Rp. 1.36 miliar, simpanan suka rela Rp. 86.98 juta, sisa hasil usaha Rp. 275.40 juta dan volume usaha Rp. 2.97 miliar. Pada tahun 2004 jumlah koperasi di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 242 unit, meliputi koperasi produksi 18 unit, Koperasi Konsumsi 44 unit, Koperasi Simpan Pinjam 10 unit, Koperasi Serba Usaha 170 unit, dengan modal sendiri sebesar Rp. 3.76 miliar, simpanan suka rela Rp. 197.47 juta, sisa hasil usaha Rp. 647.75 juta dan volume usaha Rp. 4.88 miliar. Selama tahun 2000-2004 terjadi penambahan koperasi sebesar 59,91 persen, penambahan jumlah anggota sebesar 42 persen, jumlah modal sendiri meningkat 36,23 persen dan peningkatan volume usaha sebesar 60,08 persen.
5. Sarana Prasarana Perdagangan di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2004\*) terdiri dari Pasar Pemerintah 5 buah, Pasar Koperasi 1 buah, Toko Grosir 4 buah. Jumlah Pedagang yang menempati pasar-pasar tersebut sebanyak 314 pedagang yang dilengkapi dengan Kios/Lokal 337 buah, Los 3 buah, Sedangkan jumlah Toko/Kios/Kedai yang berada diluar kompleks pasar-pasar tersebut sebanyak 738. Keadaan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2004 umumnya tidak ada lonjakan harga atau kekurangan stok secara drastis. Kondisi perdagangan antar pulau di Maluku Tenggara saat ini masih dihadapkan dengan terbatasnya sarana prasarana perdagangan, perhubungan dan transportasi yang belum memberikana kontribusi bagi distribusi orang, barang dan jasa.
6. Pengembangan industri kecil dan menengah masih terbatas terutama dalam rangka pengembangan industri pengolahan yang berbasis pada pertanian, kelautan dan perikanan serta sektor lainnya. Sampai dengan tahun 2005 jumlah dan jenis industri terdiri dari aneka industri tercatat 68 perusahaan dengan investasi sebesar Rp.1.18 miliar, industri mesin logam dan kimia 56 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp.764.08 juta, dan industri hektarsil pertanian dan kehutanan 27 perusahaan dengan total investasi 180.36 juta.
7. Potensi sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara cukup besar, dan dapat dikelompokkan ke dalam; (a) sumberdaya lahan, (b) sumberdaya air, (c) sumberdaya tambang, (d) sumberdaya hutan, belum dikelola secara optimal, bahkan terhadap potensi yang telah dikelola belum menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keberlanjutan, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.



Perairan Maluku Tenggara terletak tepat diatas garis Wallacea yang merupakan batas pertemuan antara paparan sunda di sebelah barat dan paparan sahal di sebelah timur. Garis ini identik dengan tepi timur paparan sunda yang merupakan batas tenggara dari flora dan fauna Asia, sedangkan tepi barat paparan sahal merupakan tepi barat laut dari flora dan fauna Australia, sehingga memungkinkan kehidupan biota-biota Australia dan Indo Pasifik di wilayah Maluku Tenggara. Untuk itu, maka pembangunan bidang sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Tenggara perlu diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keterpaduan sektoral dan ekologi, yang diikuti dengan penegakan hukum dan hektark-hak rakyat secara partisipatif agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara adil dan berkesinambungan bagi masyarakat dan mendukung terselenggaranya pembangunan daerah serta pengendalian dampak lingkungan.

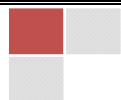
8. Sektor pertanian sebagai pemberi kontribusi terbesar perekonomian daerah perlu mendapat perhatian khusus karena selain dapat menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi pertanian akan mendukung upaya menciptakan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi serta produktivitas yang berkesinambungan. Rata-rata produksi tanaman pangan mengalami peningkatan dimana yang terbesar adalah komoditi ubi kayu dari 24.384 ton pada tahun 2004 dengan luas panen 2.032 hektar menjadi 24.480 hektar pada tahun 2005 dengan luas panen meningkat menjadi 2.040 hektar\*). Pada tahun 2006 produksi Ubi Kayu untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 21.120 ton dengan luas panen 1.760 hektar. Sub sektor tanaman pangan lainnya rata-rata mengalami kenaikan produksi namun tidak diiringi dengan kenaikan produktivitas bahkan terjadi fluktuasi produktifitas. Hal ini perlu dilakukan upaya intensif agar peningkatan produksi juga diiringi dengan peningkatan produktivitas sehingga dapat diupayakan suplai kebutuhan bahan makanan pokok yang berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara. Produksi komoditi pertanian lainnya seperti padi ladang pada tahun 2005 sebesar 238 ton dengan luas panen 110 hektar, produksi jagung sebesar 1.364 ton dengan luas panen 682 hektar, produksi kacang tanah sebesar 320 ton dengan luas panen 160 hektar, produksi kedelai sebesar 398 ton. dengan luas panen 297 hektar.\* Sedangkan pada tahun 2006 produksi jagung 1.444 ton dengan luas panen 722 hektar, jagung 286 ton luas panen 130 hektar, kacang tanah 406 ton luas panen 203 hektar, jagung 286 ton luas panen 130 hektar, ubi-ubian 1.690 ton luas panen 169 hektar.
9. Sub sektor perkebunan komoditi yang diusahakan masyarakat adalah kelapa. Perkembangan produksi komoditi unggulan seperti kelapa pada tahun 2004 sebesar 8.109 ton pada luas areal 18.775\*). Produksi kelapa yang terus menurun karena umumnya sudah tua sedangkan sedikit sekali upaya peremajaan. Pada tahun 2003 juga terjadi penyerangan hama *aspodiotus destruktur*. Masalah lain yang sementara dihadapi adalah



rendahnya animo masyarakat untuk menanam tanaman perkerbunan karena disamping lama proses produksinya juga karena kondisi pasar yang kurang menjanjikan.

Sub sektor peternakan dapat digambarkan bahwa jenis ternak yang dibudidayakan antara lain sapi, kambing, babi, dan ayam selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Ternak sapi mengalami penurunan jumlah populasi sebesar 31.47 persen atau turun dari 734 ekor pada tahun 2004 menjadi 231 ekor pada tahun 2005, kondisi yang sama juga terjadi pada jumlah populasi ternak lainnya seperti kambing dan babi sebagai akibat dari kurang berminatnya masyarakat terhadap jenis ternak tersebut karena rentan terhadap penyakit serta tingginya harga pakan. Jumlah populasi kambing pada tahun 2004 sebanyak 14.418 ekor dan pada tahun 2005 sebanyak 1.150 atau mengalami penurunan sebesar 61,23 persen, sedangkan jumlah populasi babi pada tahun 2004 sebanyak 14.240 ekor dan pada tahun 2005 sebanyak 6.536 atau turun 54,11 persen. Jumlah populasi ternak untuk Kabupaten Maluku Tenggara (tidak termasuk Kota Tual) pada tahun 2006 adalah sapi 607 ekor, kambing 5.750 ekor, babi 7.410 ekor, sedangkan untuk unggas adalah itik 1.103 ekor, Ayam Buras 44.835 ekor dan Ayam Ras 72.000 ekor.

10. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki garis pantai yang sangat panjang yang dibentuk oleh ratusan pulau-pulau kecil dan diantaranya terdapat selat-selat sempit dan dangkal yang berada diantara kawasan Laut Banda dan Laut Arafura. Hasil pemetaan wilayah pengelolaan sumberdaya perikanan oleh KOMNAS Pengkajian Stock 1998, Kabupaten Maluku Tenggara berada pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan yaitu **Wilayah V (Laut Banda)** yang memiliki potensi sebesar 248.400 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 198.700 ton per tahun. **Wilayah VI (Laut Arafura)** yang memiliki potensi sebesar 793.100 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 633.600 ton per tahun. Bila dibandingkan antara hasil produksi penangkapan tahun 2003 sebesar 111.776,6 Ton dengan JTB pada Wilayah V dan VI sejumlah 832.300 ton per tahun, maka hasil produksi penangkapan baru mencapai 13,42 persen. Ini berarti bahwa kita masih memiliki peluang produksi penangkapan sebesar 86,58 persen dari JTB atau sebanyak 720.523,4 ton yang belum tereksplotasi pada tahun 2003.
11. Pada tahun 2006, jumlah armada penangkapan sebanyak 5.167 unit dengan rincian sebagai berikut : Perahu Tanpa Motor (PTM) 5.167 unit, Motor Tempel (MT) 372 unit, Kapal Motor (KM) 45 unit. Jumlah alat penangkapan di Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebanyak 14.714 unit dengan rincian sebagai berikut : hand Line 98 unit, Gill Net 1.977 unit, Bubu 176 unit, Bagan 120 unit, Sero 6 unit, Alat Pengumpul Kerang 131 unit, Alat Pancing lain-lain 11.115 unit , dan lain-lain 1.211 unit. Pada tahun 2005 produksi hasil perikanan meningkat menjadi 131.35 ribu ton dengan rincian sebagai berikut : Kebutuhan Ekspor 103.08 ribu ton dengan Nilai USD 23.43 juta; Intersular 568 ton; pasar lokal 27.70 ribu ton\*). Jumlah Nelayan yang teridentifikasi di Kabupaten



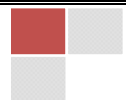


Maluku Tenggara sampai dengan Tahun 2006 sebanyak 10.062 orang dan 395 kelompok nelayan.

12. Maluku Tenggara masih memiliki kawasan hutan dengan luas sekitar 71.785 hektar. Jumlah tersebut menurut fungsi terdiri dari hutan lindung seluas 30.075 hektar, hutan produksi seluas 6.792 hektar, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 34.918 hektar. Produksi hasil hutan terutama adalah kayu yaitu jenis kayu matoa, kenari, aidel, bintanggur. Luas lahan kritis sebesar 61.364,7 hektar atau sekitar 93,85 persen yang tersebar di DAS Kei Kecil (dalam kawasan 11.299,7 hektar dan Luar Kawasan 10.476,4 hektar), dan DAS Kei Besar (dalam kawasan 16.831,8 hektar dan luar kawasan 22.757.2 hektar). Sasaran rehabilitasi lahan kritis 2004-2008 adalah 37.000 hektar baik melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan, atau melalui kegiatan swadaya masyarakat, ini berarti rata-rata 7.200 hektar per tahun tetapi jika dibandingkan dengan kemampuan realisasi rehabilitasi lahan setiap tahun yang hektarnya sekitar 5.000 hektar berarti terjadi kesenjangan sebesar 2.200 hektar per tahun.
13. Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai daerah kepulauan, terdiri dari pulau-pulau kecil. Biofisik pulau-pulau kecil menunjukkan karakter tangkapan air yang terbatas dan sumber/cadangan air tawar yang sangat terbatas sehingga rentan terhadap kekeringan, ataupun tekanan dari pengaruh eksternal baik alami maupun kegiatan manusia. Kelangkaan air tawar dan air tanah pada pulau-pulau kecil dapat dipahami karena kecilnya daerah tangkapan air hujan dan struktur geologi yang kurang mendukung. Keterbatasan ini membawa konsekuensi terhadap lambatnya perkembangan aglomerasi penduduk dan menjadi kendala bagi usaha ekonomi berskala besar. Gejala pemanasan global yang berpengaruh bagi kenaikan permukaan laut telah mengakibatkan terjadinya abrasi pantai sepanjang tahun terutama pada musim-musim ombak sementara program-program mitigasi bencana masih berjalan sangat lambat.

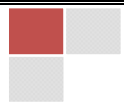
#### D. Sosial Budaya dan Politik

1. Masyarakat Maluku Tenggara pada hakekatnya adalah masyarakat religius kultural yang sejak masa penjajahan hingga berakhirnya Orde Lama hidup dalam hubungan-hubungan sosial yang sangat hamonis karena kekuatan lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai katup pengaman mampu mendekatkan jarak sosial antara masyarakat. Kearifan nilai-nilai budaya lokal seperti hukum "*larvul ngabal*" serta landasan spirit seperti "*ain ni ain*" dan "*vuut ain mehe ni ngifun, manut ain mehe ni tilur*" telah mampu memberikan stabilitas bagi kehidupan dan harmoni sosial orang Maluku Tenggara. Ketika Orde Baru terjadi pergeseran paradigma pembangunan bangsa yang berdampak pula bagi kehidupan orang Maluku Tenggara karena mulai terjadi penguatan pada ikatan-ikatan budaya universal dan melamahnya ikatan-ikatan budaya lokal. Dalam era ini stabilitas sosial yang menjamin tertibnya kehidupan masyarakat dicapai semata karena pendekatan keamanan yang sangat kuat. Degradasi



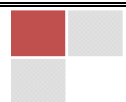
tatanan sosial dan adat Maluku Tenggara mulai berlangsung secara drastis ketika terjadi pertikaian antar kelompok di Provinsi Maluku pada tahun 1999 yang merupakan tragedi kemanusiaan bagi bangsa dan negara terutama masyarakat di Maluku. Pertikaian tersebut sempat terjadi pula di Maluku Tenggara tetapi juga paling cepat dapat dipulihkan dibandingkan daerah lain di Maluku. Pemulihan tersebut dapat lebih cepat terjadi karena dialog dan pendekatan-pendekatan religius kultural dengan intensitas yang tinggi berlangsung di Maluku Tenggara disertai dengan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk kembali merevitalisasi fungsi institusi dan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Proses pemulihan tersebut secara bertahap akan dapat mengikis prasangka sosial, segregasi fisik yang membuat jarak dalam interaksi kelompok, serta sentimen dan solidaritas kelompok yang sempit berbasis agama.

2. Kualitas sumber daya manusia Maluku Tenggara masih tergolong rendah dan juga mengalami penurunan drastis sebagai akibat langsung dari pertikaian antar kelompok. Kenyataan menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya tersebut terlihat pada aspek-aspek semangat dan kemampuan kewirausahaan, etos kerja, kepercayaan diri, kreativitas, ketrampilan, dan profesionalisme, serta penguasaan IPTEK. Taraf pendidikan penduduk Maluku Tenggara walau telah mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, namun masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indoensia. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan belum merata keseluruh pelosok Kabupaten, demikian halnya dengan jumlah, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen pendidikan yang efektif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berkembangnya sekolah-sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi pengembangan daerah belum sepenuhnya memberikan andil bagi penciptaan tenaga-tenaga trampil untuk mengisi kebutuhan ketenagakerjaan di Maluku Tenggara. Pendidikan tinggi juga telah berkembang 5 (lima) Perguruan Tinggi Swasta dan 1 (satu) Politeknik Perikanan Negeri, namun bidang keilmuan yang diemban di Perguruan Tinggi tersebut belum mencakup bidang-bidang yang sangat dibutuhkan dalam era teknologi kini dan dimasa akan datang. Berdasarkan data tahun 2004, fasilitas pendidikan yang tersedia sebagai berikut : TK 20 buah, SD 142 buah, SMP 30 buah, SLTA 18 buah, dan perguruan Tinggi 6 Buah. Daya tampung SD swasta mampu menampung 11.210 murid, sedangkan SD negeri mampu menampung 5.645 murid. Daya tampung SMP swasta 2.907 murid, SMP negeri 2.076 murid sehingga yang ada di sekolah swasta lebih banyak daripada negeri, sementara daya tampung SLTA negeri lebih besar dari swasta dimana untuk swasta mampu menampung 1819 murid dan negeri 2.832 murid.
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Maluku Tenggara yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2004 sebesar 68,7 persen mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing daerah. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masalah utama pembangunan bidang pendidikan adalah masih terbatasnya akses



dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, antara lain terlihat dari masih belum tercapainya angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MTs baru mencapai 80,82 persen, SMP/MI 74,71 persen tahun dan SMA/SMK/MA 26,86 persen. Angka melek huruf telah mendekati 98 persen namun rata-rata lama sekolah masih di atas tujuh tahun\*). Permasalahan lain yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, rasio dan penyebaran tenaga guru teristimewa guru bidang studi belum sebanding serta masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat di perkotaan dan pedesaan dan antara penduduk miskin dan penduduk yang sudah mampu. Pendidikan non-formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat juga belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

4. Status Kesehatan masyarakat Maluku Tenggara secara umum masih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia karena belum terselenggaranya akses pelayanan kesehatan secara paripurna yang meliputi aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif, dan aspek rehabilitatif. Status kesehatan yang masih rendah tersebut diukur dari Angka Harapan Hidup pada tahun 2004 sekitar 41,2 persen, Angka Kematian Ibu Melahirkan masih 428 per 100.000 kelahiran, Angka Kematian Bayi 31 per 1.000 kelahiran hidup, penyebaran satus gizi kurang 8,22 persen dan Gizi Buruk 1,20 persen dan tingginya prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), tingginya prevalensi Penyakit Menular seperti Malaria, TB Paru, Frambusia, Pneumonia, Vilariasis, HIV/AIDS, kusta, dan lain-lain. Saat ini telah tersedia 14 Puskesmas, 38 Puskesmas Pembantu, 39 Polindes dan Puskesmas Keliling namun demikian pemerataan dan keterjangkauan pelayanan masih dihadapkan dengan kendala biaya dan jarak transportasi. Rendahnya derajat kesehatan tersebut disebabkan belum terselenggaranya pelayanan kesehatan secara paripurna menyangkut aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif, dan aspek rehabilitatif. Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih sangat terbatas. Masalah-masalah ini dipengaruhi juga oleh kondisi geografis Maluku Tenggara yang menjadi faktor kesulitan dan biaya tinggi bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada institusi yang tersedia.
5. Rumah Sakit Umum Daerah saat ini telah berfungsi sebagai Rumah Sakit Rujukan, baik untuk pelayanan pasien Maluku Tenggara maupun pasien yang berasal dari Daerah lain seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, dan Irian Jaya Barat bagian selatan. Jumlah pasien rujukan tahun 2004 sebanyak 4.321 orang, 20 orang diantaranya berasal dari luar daerah Maluku Tenggara, sedangkan yang datang sendiri dari luar daerah untuk berobat ke RSUD sebanyak 182 orang. Revitalisasi pelayanan RSUD diarahkan untuk pelayanan kesehatan Keluarga Miskin. Sepanjang tahun 2004 jumlah pasien dari Keluarga miskin yang berobat ke RSUD sebanyak 1.022 orang terdiri dari 465 pasien UGD dan 557



pasien Rawat Jalan. Jumlah Pasien Keluarga Miskin yang berobat menggunakan Kartu Askeskin tercatat sebanyak 1.505 orang. Jumlah Pasien Keluarga Miskin yang menggunakan fasilitas Rawat Inap kelas tiga sebanyak 483 Orang dengan jumlah hari 1.952 hari. Fasilitas yang tersedia pada RSUD dan perlu terus dikembangkan adalah bangunan Gedung yang representatif, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai, dan penyediaan dana operasional yang cukup.

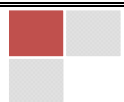
6. Taraf kesejahteraan sosial sungguhpun telah meningkat dibanding dasawarsa sebelumnya sejalan dengan keberhasilan-keberhasilan pembangunan daerah namun upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dan penyandang masalah sosial masih perlu terus dilakukan secara lebih terarah dan simultan. Permasalahan kesejahteraan sosial sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor rendahnya tingkat pendidikan, keterisolasian dan keterbelakangan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang penanganan penyandang masalah sosial dan lain-lain.
7. Pemberdayaan Perempuan masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya karena status peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Ketidaksetaraan tersebut masih terlihat pada sektor-sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ekonomi, hukum, politik, dan ketenagakerjaan. Rasio jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.
8. Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya dalam pembangunan pariwisata dikembangkan untuk kegiatan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat. Wisata alam meliputi kawasan Pantai Nurbloat, Pantai Ohililir, Desa Disuk, dan lain-lain. Wisata budaya meliputi kawasan wisata Desa Adat dan Budaya (Desa Tanimbar Kei dan Desa Banda Elly), Situs Sejarah Desa Wain, Cagar Budaya seperti tulisan/gambar kuno di Desa Ohoidertaun selain upacara adat dan festival tarian-tarian adat seperti sosoi, sawat, tiwa, bazar dan lain-lain. Wisata minat khusus meliputi kegiatan selam (diving), wisata Desa Perikanan, Lokasi Industri Perikanan, Lokasi Budi daya Perikanan, Lokasi Pembibitan dan Budi Daya Mutiara, dan lain-lain. Sarana pendukung pariwisata yang telah ada adalah hotel berbintang tiga, hotel non bintang, penginapan, restoran, rumah makan, dan biro/agen perjalanan.
9. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki keanekaragaman seni sebagai perwujudan dari hektarsil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat secara turun temurun, meliputi seni tari yang terhimpun dalam 8 sanggar budaya, seni musik (kelompok vocal group dan kelompok paduan suara), dan kelompok-kelompok seni pertunjukan dan non pertunjukan. Upacara adat yang masih lestari dan terjaga sebanyak 4 macam, tradisi budaya berupa peristiwa-peristiwa inisiasi yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia sebanyak 4 macam. Peninggalan sejarah dan purbakala terdapat di 8 tempat, makam/tempat ziarah 4 buah, dan benda-benda cagar budaya. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada

tahun 2004 tercatat sebanyak 120 orang, dan wisatawan manca negara sebanyak 7.101 orang

10. Semangat reformasi dan demokrasi yang sedang bergulir yang semakin menguat di tengah masyarakat serta perlakuan otonomi daerah sebagai paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan merupakan momentum yang tepat untuk pembangunan kapasitas kelembagaan politik di daerah sehingga pada gilirannya diharapkan dapat tercipta pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat yang demokratis serta dapat memberikan ruang yang luas bagi perwujudan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan partisipasi politik rakyat, kesadaran masyarakat politik masyarakat telah ditunjukkan pada Pemilu 2004 yang diikuti oleh 96,2 persen pemilih. Penguatan demokrasi di tingkat lokal harus dapat dilaksanakan melalui fungsi-fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran aspirasi, serta komunikasi politik, karena secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, menopang integritas dan persatuan bangsa, mewujudkan keadilan, menegakan hukum, menghormati hak-hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Penguatan demokrasi lokal juga akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan cara seperti ini demokrasi akan lebih cepat meresap kebawah dan dirasakan secara konkrit oleh masyarakat, sehingga proses demokratisasi akan lebih mengakar dan terlembagakan secara horisontal di tengah masyarakat, sekaligus diharapkan dapat mengikis demokrasi yang bersifat elitis.

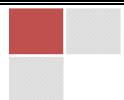
#### **E. Sarana Prasarana**

1. Kondisi fisik di Maluku Tenggara yang berupa kepulauan mengharuskan transportasi laut sebagai transportasi utama. Transportasi tersebut untuk mendukung pergerakan orang dan barang terutama pemasaran hasil produksi, baik itu pergerakan dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ke wilayah lainnya maupun antarwilayah (Kecamatan) di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri. Pergerakan dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ke wilayah lainnya maupun pergerakan antara kota-kota yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dilayani oleh jasa pelayaran dari Kapal Nusantara (PELNI), Kapal Perintis, Kapal Feri milik ASDP, dan Kapal Pelayanan Rakyat (Pelra) yang dikelola oleh swasta dan perseorangan, serta Kapal Pelayaran Angkutan Barang. Rute pelayaran kapal yang melayani pergerakan penduduk di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut : (a) Rute pelayaran kapal PELNI yang menghubungkan kota-kota di Timur Indonesia dengan bagian barat Indonesia, dan Rute Sulawesi Utara-Irian jaya Barat Bagian Timur-Maluku Tenggara-Kepulauan Aru dan Irian jaya Barat bagian selatan, (b) Rute pelayaran perintis yang beroperasi untuk jalur Ambon - Banda - Tual ke



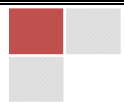
Maluku Tenggara Barat, (c) Pelayaran rakyat yang beroperasi untuk transportasi antarpulau, (d) Pelayaran Kapal Barang dari Surabaya ke Tual mengangkut komoditas perdagangan pulang-pergi. Prasarana pelabuhan/dermaga terdapat di Kota Tual, dan Elat merupakan pelabuhan-pelabuhan dengan fasilitas cukup menunjang karena konstruksinya telah permanen (konstruksi beton). Pengembangan prasarana dan sarana yang lain berupa pelabuhan-pelabuhan lokal atau pelabuhan penyeberangan di setiap kota Kecamatan antara lain di Rumat, Ohoira, Tayando, dan Weduar.

2. Sarana transportasi udara sangat berperan penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terutama dalam hubungan antarwilayah yang membutuhkan perpindahan orang dan barang dalam waktu singkat. Saat ini kondisi Lapangan Terbang Dumatubun Langgur (Bandara Kelas IV) milik TNI AU sudah tidak dapat dikembangkan untuk melayani penerbangan dengan menggunakan Pesawat Terbang berbadan lebar. Sarana perhubungan udara yang melayani penerbangan dari dan ke Kota Tual selama ini adalah Pesawat jenis CASA milik Merpati dengan rute penerbangan Ambon - Tual - Dobo PP yang frekwensinya dua kali seminggu, sedangkan Tual - Ambon PP lima kali seminggu dilayani oleh Pesawat jenis Dash 8 seri 300 Wings Air dan ATR 32 Trigana Air. Jika dilihat perkembangan frekwensi dan jumlah penumpang, maka Kabupaten Maluku Tenggara sudah harus membangun Lapangan Terbang Tual Baru untuk mengantisipasi ledakan arus penumpang dan kebutuhan penerbangan Tual - Ambon - Papua (Sorong, Timika, Kaimana), Tual - Ambon - Maluku Utara (Sanana, Ternate) - Sulawesi Utara (Menado), Tual - Dobo -Saumlaki - Kisar - Kupang - NTB - Bali, yang berprospek untuk masa yang akan datang. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan studi kelayakan penentuan lokasi dan Pemerintah Daerah telah membiayai penyusunan Rencana Induk LAPTER serta Rencana Rinci Sisi Darat dan Rencana Rinci Sisi Udara di Desa Ibra Kecamatan Kei Kecil. Bandara Baru tersebut diharapkan sebagai Bandara Nasional/Internasional untuk menggantikan Bandar Udara Kelas IV di Langgur.
3. Peningkatan dan pengembangan perhubungan darat dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangan jasa termasuk sarana prasarana pelayaran penyeberangan perlu terus ditingkatkan. Moda angkutan darat yang beroperasi untuk melayani kebutuhan pengangkutan barang dan orang di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2004 terdiri dari Bus sebanyak 18 unit, Mini Bus 430 unit, truk 43 unit, dan lain-lain 1.842 unit. Saat ini pelayaran Angkutan Penyeberangan dilayani Kapal Feri milik ASPD dengan rute dari Tual ke Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara Barat dan masih dibutuhkan untuk melayani rute Kecamatan di Maluku Tenggara seperti Kecamatan Kur dan Kec Kei Besar. Peningkatan layanan transportasi yang efisien dan efektif bagi masyarakat masih diperlukan pengembangan suatu sistem transportasi lokal yang terintegrasi antara



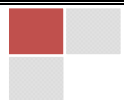
moda udara, darat, dan laut dalam suatu Tatahan Transfortasi Lokal yang handal.

4. Kondisi Sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara jika dilihat dari jaringan yang menghubungkan dari pusat permukiman penduduk dengan wilayah-wilayah pertumbuhan masih sangat minim sehingga belum semua pusat-pusat permukiman pedesaan yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terhubung dengan baik oleh jaringan jalan. Pada tahun 2004 jaringan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara yang telah dibangun adalah sepanjang 1.885 kilometer terdiri dari jalan Provinsi 144,10 Km dengan jenis permukaan aspal, dalam kondisi baik 41,65 kilometer, sedang 16,50, dan rusak ringan 85,95 kilometer. Jalan kabupaten 1.710,67 kilometer dengan jenis permukaan aspal 431,78 kilometer dimana dalam kondisi baik 41,23 km, sedang 87,07 kilometer, rusak berat 1.582,37 kilometer, serta jalan jenis permukaan tanah 1.238,70 kilometer. Dalam rangka pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara mencakup pembangunan, pengembangan, perbaikan, dan peningkatan jaringan jalan kabupaten yang bertujuan untuk mempermudah hubungan antara ibukota kabupaten dan kecamatan serta antara kecamatan dan desa. Pembukaan akses ke wilayah-wilayah terpencil yang terisolasi untuk menunjang terbentuknya sentra-sentra produksi sehingga prioritas jaringan jalan harus dibangun dan dikembangkan. Ruas jalan yang dibangun dan dikembangkan tersebut adalah ruas jalan Bombai - Ad, Ngurdu Hollat, Hollat - Ohoiraut termasuk ruas jalan Lingkar Pulau Kei Besar, ruas jalan di Kecamatan Kepulauan dan dalam kota kecamatan serta peningkatan jalan dalam ibukota kabupaten.
5. Sarana irigasi/pengairan yang tersedia dalam menunjang sentra produksi pertanian telah dibangun beberapa saluran irigasi di beberapa lokasi di Kecamatan Dullah Utara, Kei Besar Selatan, dan Kecamatan Kei Kecil untuk mengairi lahan seluas 5 hektar.
6. Bertambahnya jumlah penduduk memerlukan peningkatan pembangunan sarana prasarana permukiman. Saat ini masih banyak penduduk perkotaan dan pedesaan yang belum memiliki rumah apalagi rumah yang sehat. Penyediaan air minum juga belum mengalami kemajuan yang berarti baik di kota maupun pedesaan. Sebagian desa terutama desa-desa di pulau-pulau kecil masih sering mengalami krisis air bersih dimusim panas, selain itu penyediaan fasilitas permukiman di kota maupun pedesaan juga masih terbatas. Pembangunan bidang Permukiman di perkotaan telah diarahkan antara lain pada pembangunan fasilitas perkotaan berupa penerangan jalan, drainase, serta pada pembangunan desa-desa pesisir yang terancam abrasi pantai pembangunan terutama pembangunan pengaman pantai.
7. Pelayanan sarana prasarana Air Bersih telah dilakukan oleh PDAM milik Pemda dengan jumlah produksi air bersih dari sumber mata air Evu sebesar 375.048 meter kubik liter per detik, jumlah pelanggan pada tahun 2004 sebanyak 2.021 pelanggan\*) Sambungan Rumah (SR) yang



berarti cakupan pelayanan PDAM Tual mencapai 1,40 persen dari jumlah penduduk. Sarana prasarana Air Bersih telah dikembangkan di Kecamatan Kei Kecil Timur yang sumber mata airnya berasal dari Wain/Samawi dan Kecamatan Dullah Utara dari sumber mata air Danau Ngadi.

8. Pelayanan energi listrik di Kabupaten Maluku Tenggara dilayani oleh PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Cabang Tual yang bersumber pada unit-unit PT. PLTD yang terdapat di Langgur, dan Elat. Wilayah pelayanan dan unit PT. PLTD Langgur meliputi Kota Tual, Kecamatan Kei Kecil, Kei Kecil Timur, dan sebagian Kecamatan Kei Kecil Barat. Unit PLTD Elat melayani Kecamatan Kecamatan Kei Besar, sebagian Kecamatan Kei Besar Selatan, dan sebagian Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Kecamatan yang belum terlayani oleh listrik PLN yaitu sebagian Kecamatan Kei Besar Utara Timur, sebagian Kei Besar Selatan, sebagaia Kecamatan Kei Besar, serta sebagian besar Desa-desa di pulau-pulau kecil dan terpencil. Masyarakat pada wilayah-wilayah tersebut umumnya menggunakan sumber energi non PLN yang disediakan sendiri, sedangkan sebagian belum menikmati layanan listrik. Pelayanan kelistrikan di Kabupaten Maluku Tenggara yang disediakan PT. PLN Cabang Tual (PLTD) untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan jumlah mesin sebanyak 21 Unit, kapasitas terpasang 15,256 KW, dan Daya mampu 6.900 KW. Jumlah pelanggan sebanyak 16.062 pelanggan. Kebutuhan tenaga listrik pada masa yang akan datang diperkirakan akan terus bertambah.
9. Sarana telekomunikasi di Kabupaten Maluku Tenggara dilayani oleh Kantor Daerah Telekomunikasi Tual dan Kantor Cabang Elat Kecamatan Kei Besar dengan kapasitas sentral dan jumlah langganan di Tual dengan kapasitas sentral 3.144 jumlah pelanggannya 2.994 dan Elat dengan kapasitas sentral 50 jumlah pelanggannya 45. Pelayanan telepon seluler oleh Simpati Telkomsel dan Mentari Satelindo baru dapat melayani seputaran kawasan Kota Tual, Langgur, dan sekitarnya.
10. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sesuai arahan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara didasarkan atas pola pemanfaatan lahan darat dan laut dari potensi yang dimiliki. Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dibagi dalam 5 (lima) sub wilayah yaitu :
  - (1) Kawasan Kecamatan Kei Kecil, Kei Kecil Barat dan Kei Kecil Timur memiliki potensi pertanian lahan kering, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan hasil laut. Pusat sub wilayah ini adalah Kota Rumat.
  - (2) Kawasan Kecamatan Kei Besar dan Kei Besar Utara Timur dengan dominasi kegiatan pertanian, perikanan dengan potensi berupa pertambangan (minyak), pertanian lahan kering, perikanan laut, dan pariwisata. Pusat sub wilayah ini adalah Kota Elat
  - (3) Kawasan Kei Besar Selatan dengan potensi pertanian lahan kering, perikanan, dan pariwisata dengan pusat sub wilayahnya adalah Kota Weduar.





11. Berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, rencana kawasan lindung di wilayah Maluku Tenggara meliputi :

- (1) Kawasan Hutan Lindung tersebar di beberapa bagian Kecamatan seperti di Pulau Tanimbar Kei, Pulau Wetir, Pulau Warbal, Pulau Manir, Pulau Waha dan sekitarnya di Kecamatan Kei Kecil Barat, Pulau Durowa dan Tanjung Obahan di Kecamatan Kei Besar Selatan.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri dari kawasan sepadan sungai meliputi DAS sungai-sungai Evu, Semawi, Uf, Hollay, Wetuar, Hoatlaay, Ur, dan Sungai Weduar. Kawasan sepadan pantai meliputi pantai pulau-pulau di Kecamatan Kei Kecil, Kei Besar Utara Timur, dan Kei Besar. Kawasan sekitar danau/waduk meliputi Danau Ablel dan Danau Wearlaai di Kei Keciil.
- (3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya meliputi 3 (tiga) jenis yaitu pantai berhutan bakau, pantai terumbu karang dan hutan cagar alam. Kawasan *pantai berhutan bakau* di Pualu Kei Kecil seluas 1.613,3 hektar di Desa Evu, Warwut, Rumahdian, Yatvav, Kolser, Isso, Teluk Un dam spot-spot lain di Pulau Kei Besar seluas 114,0 hektar di Desa Werka dan sedikit di Desa Yamtel. Pantai *bertrumbu karang* di pulau Nai dan pulau Manir di Kei Kecil Barat, Pantai desa Raat di Kei Kecil Timur, Pantai desa Rumahdian, Kolser dan Ohoililir di Kecamatan Kei Kecil, Pantai Desa Ohoiwait dan Desa Yamtel di Kei Besar, Pantai desa Ngafan di Kei Besar Selatan, dan Pantai Desa Hollat di Kei Besar Utara Timur.

Kawasan budidaya dan pemanfaatannya di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel 1.

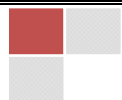
**Tabel 1.**  
Pemanfaatan Kawasan Budi Daya Kabupaten Maluku Tenggara

| No | Jenis Kawasan Budi Daya    | Luas (Ha) | Lokasi Penyebaran   |
|----|----------------------------|-----------|---|
| 1  | Budi Daya Pertanian        |           |   |
|    | a. Pertanian Lahan Kering  | 1.534,48  | Kec. Kei Kecil, Kei Kecil Barat, Kei Besar, Kei Besar Selatan |
|    | b. Perkebunan              | 13.129,00 | Kec. Kei Kecil Barat, Kei Besar, Kei Besar Selatan            |
|    | c. Hutan Produksi          | 37.434,00 | Kec. Kei Besar, kei Kecil Barat                               |
|    | d. Hutan Produksi Konversi | 29.729,14 | Kec. Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur.                        |
|    | e. Perikanan               |           |   |
|    | - Budidaya                 |           | Tersebar diseluruh kecamatan                                  |
|    | - Tangkap                  |           | Tersebar diseluruh kecamatan                                  |
| No | Jenis Kawasan Budi Daya    | Luas (Ha) | Lokasi Penyebaran   |

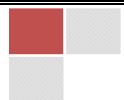
|   |                         |          |  |
|---|-------------------------|----------|--|
| 2 | Budi Daya Non Pertanian |          |  |
|   | a. Kawasan Permukiman   | 3.901,38 | Tersebar diseluruh kecamatan   |
|   | b. Kawasan Pariwisata   | -        | Kei Kecil, Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur,,<br>Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, |
|   | c. Zona Industri        | -        | Kei Kecil Timur, Kei Kecil   |

## F. Pemerintahan

1. Sejak bergulirnya reformasi di berbagai bidang upaya penyesuaian terhadap tuntutan reformasi birokrasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Beban kerja yang semakin meningkat secara tajam sebagai konsekuensi penyerahan sebagian besar kewenangan pusat ke daerah menuntut perlunya peningkatan profesionalisme, etos kerja dan komitmen yang kuat dari aparatur pemerintah. Paradigma lama dalam cara pandang, perilaku, dan etos kerja yang mengemuka pada lemahnya visi para pejabat mengenai hakekat pembangunan, pola pikir aparat yang *project oriented* perlu direformasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta berusaha mentransformasikan semangat *entrepreneurship* (wirausaha) ke dalam sektor publik dan birokrasi pemerintahan. Kualitas Aparatur Daerah perlu ditingkatkan untuk lebih mampu memformulasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara baik serta tanggap terhadap kepentingan dan hak pelayanan yang seharusnya diperoleh masyarakat.
2. Penguatan terhadap organisasi pemerintahan daerah dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi. Pada tahun 2004 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Penataan Struktur Organisasi Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Sekretariat Daerah. Penataan organisasi tersebut mengakibatkan penggabungan beberapa Dinas/Badan dan pembentukan Dinas-Dinas baru serta diikuti dengan pengisian jabatan-jabatan struktural. Penggabungan dan pembentukan institusi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang didasarkan atas PERDA. Perubahan organisasi tersebut adalah pembentukan 1 (satu) Dinas Baru yaitu Dinas Pariwisata, penggabungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Refungsionalisasi Dinas Informasi dan Komunikasi menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Daerah dan Peningkatan Sub Bagian Ketertiban pada Sekretariat Daerah menjadi Kantor Polisi Pamong Praja.



3. Pengembangan wilayah perlu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah secara seksama perlu mencermati kemungkinan-kemungkinan pemekaran Daerah dan Kecamatan. Pada tahun 2004 Pemerintah Daerah telah memfasilitasi pembentukan Kabupaten Pemekaran Kepulauan Aru, yang ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 serta ikut menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penunjang kegiatan DPRD daerah tersebut. Demikian halnya dengan Pemekaran Kota Tual yang telah ditetapkannya dengan Undang undang Nomor 31 Tahun 2007 akan ditindak lanjuti. Pemekaran daerah kedepan pada prinsipnya harus berdasarkan aspirasi masyarakat serta memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pemekaran Kecamatan dilakukan melalui penelitian dan pengkajian yang dalam sehingga diharapkan daerah/wilayah yang dimekarkan harus menjadi cikal bakal atau berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang kompetitif dan dapat saling berakses antara pusat-pusat pertumbuhan serta mengurangi persoalan rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan
4. Permasalahan yang dihadapi pemerintahan serta permasalahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Desa sebagian besar disebabkan oleh persoalan-persoalan regulasi yang mendasari proses penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa. Permasalahan tersebut menyebabkan upaya untuk membangun pemerintahan desa yang kuat dan memiliki legitimasi serta didukung oleh rakyat belum dapat dipenuhi. Pada sisi lain kebijakan-kebijakan penguatan terhadap pemerintahan desa apabila tidak dilandasi oleh peraturan daerah tentang pemerintahan desa yang jelas dalam masa-masa transisi ini, maka dikhawatirkan justru akan kontraproduktif. Dalam upaya penanggulangan kesenjangan regulasi daerah khususnya yang mengatur tentang pemerintahan desa setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ohoi (Desa).
5. Penegakan supremasi hukum harus dilakukan melalui pembaharuan produk hukum baik berupa keputusan maupun peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah disertai sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan daerah maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku agar dapat membentuk moral yang tinggi. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum masih perlu terus didorong dan ditunjang dengan sarana dan prasarana hukum dalam konteks pembangunan daerah khususnya pembangunan di bidang hukum. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam upaya penanggulangan kesenjangan penegakan hukum, telah menerbitkan berbagai Peraturan Daerah serta melakukan sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi penyelewengan dan penyalahgunaan aturan hukum yang berlaku. Penetapan berbagai kerangka regulasi



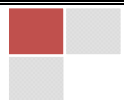
daerah tentunya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, termasuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

6. Kebebasan Pers dan Media di Maluku Tenggara telah mulai berkembang dengan baik ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kalangan pers dan media belum sepenuhnya dapat mengatasi dampak dari kebebasan tersebut antara lain masih berpihak pada kepentingan tertentu daripada kepentingan publik yang lebih luas.
7. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah yang antara lain telah diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Langkah awal yang ditempuh melalui penetapan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi organisasi dan aparatur daerah termasuk merubah pola pikir untuk terfokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Langkah ini diikuti dengan pembenahan sistem manajemen yaitu kajian tentang penerapan sistem pelayanan terpadu satu atap sesuai PP Nomor 8 tahun 2004 dan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Saat ini pelayanan publik yang transparan, cepat, murah, manusiawi dan berkualitas belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah.

## 2.2. TANTANGAN

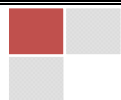
### A. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup

1. Posisi geografis Maluku Tenggara yang strategis karena terletak antara Kabupaten-Kabupaten di provinsi Maluku dan provinsi Papua Barat sebenarnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan perdagangan komoditas daerah ini kedepan, namun demikian masih ada tantangan yang harus dihadapi. Kondisi geografis masih mengakibatkan keterisolasian secara fisik maupun sosial. Dengan kondisi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil, membawa konsekuensi mahalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi, akibatnya interaksi antar wilayah menjadi rendah, padahal tingkat interdependensi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi sangat tinggi.
2. Dalam 20 tahun kedepan kebutuhan penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman akan terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk Maluku Tenggara. Selain itu kebutuhan lahan untuk pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa diperkirakan akan semakin bertambah pula seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah. Kecenderungan perkembangan



tersebut bukan tidak mungkin akan semakin memperkecil lahan hutan produktif dan sebaliknya dapat memperbesar luasan lahan kritis apabila tidak ditatakelola sejak saat ini secara baik. Dalam hubungan ini, peruntukan penggunaan lahan khususnya untuk usaha pertanian, perkebunan, industri dan pertambangan perlu diatur secara efektif melalui pemetaan dan perwilayahan komoditas terhadap potensi sumber daya alam baik potensi kelautan maupun daratan, seperti perikanan (ikan dan non ikan), pariwisata (wisata budaya, wisata bahari, kehutanan (kayu dan non kayu), perkebunan (kelapa dalam, cengkeh, pala), dan pertambangan (bahan logam, non logam, bahan galian C, minyak dan gas bumi).

3. Dimasa datang pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan persoalan yang harus benar-benar mendapat perhatian serius, disebabkan oleh besarnya tantangan lingkungan yang dihadapi daerah ini. Krisis air bersih, krisis pangan dan krisis energi diperkirakan dapat saja terjadi. Ancaman krisis air disebabkan oleh memburuknya kondisi lingkungan pulau-pulau kecil dan hutan akibat deforestasi yang terjadi, yaitu berupa peralihan fungsi hutan menjadi kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan berpindah-pindah, perindustrian dan pertambangan, serta masih meningkatnya pemanfaatan hektarsil hutan yang tidak terkendali termasuk *illegal logging/cutting*. Pembukaan lahan pertanian/perkebunan yang berpindah-pindah berakibat berkurangnya luas hutan yang selanjutnya akan berdampak berkurangnya keanekaragaman hektaryati yang ada didalamnya yang sebenarnya mempunyai potensi untuk pengembangan jasa-jasa lingkungan dan devirsifikasi pangan serta berpengaruh terhadap atribut ekologis dan proses ekologi pesisir yang menentukan daya dukung lingkungan pesisir dan lautan yang memiliki sumberdaya yang kaya dan bervariasi untuk bahan makanan. Disamping itu, *illegal fishing* akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber pangan laut dan rusaknya ekosistem laut dan pesisir. Pada masa datang, pulau-pulau kecil dengan wilayah-wilayah pesisir serta sumber daya alamnya akan mengalami tekanan yang semakin besar untuk menanggulangi pemanfaatan yang saling bertentangan dari berbagai sektor ekonomi seperti pertambangan, industri, rekreasi dan pariwisata, pengangkutan dan perhubungan, perniagaan dan perdagangan, penangkapan dan budi daya perikanan dan sebagainya.
4. Sebagai daerah kepulauan yang terletak diantara pertemuan lempeng benua Euroasia dari barat, Indo-Australia dari selatan dan Lempengan Samudra Pasifik dari timur, Maluku Tenggara merupakan salah satu daerah di Maluku yang rawan gempa tektonik. Efek dari pertemuan lempengan-lempengan geologis tersebut adalah terbentuknya jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa di laut yang berpotensi mengakibatkan terjadinya ancaman tsunami. Selain itu, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan juga merupakan bencana yang sering terjadi, disebabkan musim kemarau dan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Kekeringan menyebabkan kelangkaan air bersih terutama di

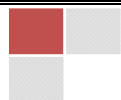


pulau-pulau kecil yang sangat rendah daerah tangkapan airnya. Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau menimbulkan dampak negatif dalam hal kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas lahan. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum dirumuskannya upaya konkret terhadap pengurangan risiko bencana alam.

5. Di Bidang Lingkungan Hidup tantangan yang masih dihadapi adalah pemanfaatan sumberdaya alam belum mengacu pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan kelestarian, dimana kelestarian kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi dan hutan lindung terancam oleh kegiatan masyarakat seperti pertambangan, penebangan dan pembangunan lainnya, demikian halnya dengan kelestarian ekosistem laut dan pesisir yang masih dibayangi praktik-praktek pengelolaan destruktif dan *illegal fishing*. Rendahnya kapasitas kelembagaan dalam koordinasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan dan memadukan kepentingan konservasi dengan pembangunan.

## B. Demografis

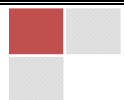
1. Pada tahun 2025, dengan estimasi laju pertumbuhan rata-rata 3,18 Persen penduduk Kabupaten Maluku Tenggara diperkirakan sebesar 147.805 jiwa. Beberapa parameter kependudukan diharapkan harus mengalami perbaikan seperti makin meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kelahiran dan angka kematian bayi. Walau demikian pengendalian pertumbuhan penduduk tetap juga dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM, daya saing dan kesejahteraan rakyat. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapat perhatian untuk mencegah ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
2. Pada tahun 2025, pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan meningkat menjadi 56.683 orang, dengan demikian diperlukan peningkatan/perluasan lapangan kerja. Komposisi pendidikan angkatan kerja yang saat ini didominasi oleh tamatan pendidikan SD harus dapat ditingkatkan untuk didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SLTP dan SLTA, sehingga angkatan kerja tidak terdampar terserap dalam bidang pekerjaan kasar dengan upah rendah. Kebanyakan tenaga kerja di Maluku Tenggara berada pada sektor pertanian dan perkebunan tradisional, masih sangat sedikit pada sektor perikanan yang justru potensinya sangat besar. Dengan demikian kapasitas perekonomian pada masa datang terutama pada sektor-sektor primer diharapkan untuk tumbuh berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak. Disisi lain, sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Disamping itu perlindungan yang layak dan keselamatan kerja yang memadai serta hubungan industrial yang memuaskan merupakan tantangan masa depan yang harus dihadapi pula.



3. Pembangunan Bidang Keluarga Berencana disamping untuk membentuk Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, tetapi juga dalam rangka pembinaan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Tantangan yang masih dihadapi adalah Tingginya angka kelahiran yang tidak didukung dengan pertumbuhan konsumsi gizi, kualitas kesehatan reproduksi yang masih rendah, Sistem pelayanan keluarga berencana belum berjalan secara terpadu sebagaimana mestinya, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan keluarga berencana.
4. Persoalan kemiskinan bersifat multidimensi, sehingga upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tidak semata-mata melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu perluasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan perlu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hektarsil pembangunan. Proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu didukung oleh kebijakan ekonomi nasional dan daerah yang berpihak kepada rakyat miskin (*pro-poor*), dengan pendekatan yang holistik sehingga merubah perilaku ekonomi subsistem yang pada gilirannya berimplikasi pada perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat terurama melalui peningkatan pendapatan rumah tangga.

### C. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Pembangunan ekonomi daerah meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun masih jauh dari harapan terutama untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang masih harus dihadapi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan berbagai kebijakan pembangunan dan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas peran beberapa sektor penting ekonomi daerah yang selama ini memberikan kontribusinya, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan berada dalam kisaran 10 persen di tahun 2025. Oleh sebab itu kelembagaan ekonomi perlu diefektifkan dengan dukungan sistem perbankan, infrastruktur ekonomi yang memadai, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta akses yang luas kepada masyarakat dalam hektarl penyediaan modal bagi usaha kacil dan menengah. Kemajuan ekonomi suatu daerah perlu didukung oleh kemampuan untuk mengembangkan kemandirian yaitu melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang didukung oleh penguasaan dan penerpan teknologi, peningkatan produktivitas SDM, pengembangan kelembagaan ekonomi



yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu salah satu tantangan serius dalam pengembangan berbagai usaha baik pertanian, perikanan, pariwisata dan lain-lain adalah persoalan skala usaha yang terlalu kecil. Kecilnya skala usaha sangat sulit mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pada substansinya. Kemiskinan sering menjadi kronis karena konsumsi masyarakat lebih tinggi dari tingkat produktivitasnya. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tertatanya sektor ekonomi tradisional dan informal yang selama ini memberikan sumbangan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Maluku Tenggara yaitu, sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, pertambangan, hotel dan restoran.

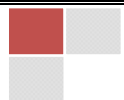
2. Peningkatan kemampuan Keuangan Daerah merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan penyelenggaraan otonomi dan pembangunan daerah. Tantangan utama yang harus dihadapi adalah memperbaiki struktur pendapatan daerah kita yang masih mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan yang bersumber dari Pemerintah. Dalam 20 tahun kedepan upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan defirsifikasi Pendapatan Asli Daerah harus terus dilakukan secara efisien, efektif dan berkelanjutan untuk memperbaiki struktur anggaran daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu akhir-akhir ini kebutuhan pembiayaan yang secara normatif harus dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah dari hari ke-hari semakin meningkat, sementara peningkatan Pendapatan Asli daerah berjalan lambat. Bersamaan dengan itu, peningkatan kemampuan keuangan daerah juga harus diikuti dengan upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang hektarndal.
3. Dalam 20 tahun kedepan investasi Pemerintah/Pemerintah Daerah harus dibatasi dalam bidang-bidang tertentu saja, sehingga perlu didorong perluasan investasi swasta yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan. Dalam hubungan ini perlu terus diciptakan stabilitas sosial dan keamanan yang berkelanjutan, pengadaan regulasi dan deregulasi daerah untuk menciptakan kepastian berusaha, serta memperkuat dan mengefektifkan peran kelembagaan daerah dalam rangka meminimalkan kendala-kendala birokrasi dan sosial yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
4. Struktur permodalan di daerah ke depan perlu didorong agar permodalan daerah hanya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang bersifat strategis terkait dengan kepentingan masyarakat luas, sedangkan distribusi permodalan yang berasal dari lembaga keuangan/perbankan perlu diperluas secara proporsional diberbagai wilayah Maluku Tenggara untuk mendukung dinamika aktivitas ekonomi masyarakat berskala mikro, kecil, menengah dan besar.



5. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus meningkat baik jenis dan volume usaha maupun jumlah keanggotaannya, termasuk munculnya wirausaha - wirausaha baru sehingga sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya (Usaha Mikro, Kecil dan Mengah) sangat diperlukan untuk mendorong berkembangnya pendapatan perkapita dan mengurangi jumlah masyarakat miskin serta mengatasi tingkat pengangguran. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah masih terbatasnya akses terhadap modal usaha dan informasi pasar, kemampuan manajemen usaha yang masih lemah, serta perlu dibangunnya etos kerja produktif.
6. Pembangunan bidang Perdagangan yang diharapkan dapat mengembangkan sektor riil dan perdagangan antarpulau dimana kota-kota kecamatan diharapkan berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayahnya secara kompetitif. Keinginan ini masih dihadapkan dengan tantangan minimnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana perhubungan yang belum memadai. Demikian halnya dengan bidang Perindustrian belum tertatanya, dan terbatasnya akses pengarajin industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pasar. Pengembangan industri berskala besar masih berjalan lambat, dan belum terpadu antara hulu dan hilir yang melibatkan usaha-usaha ekonomi rakyat.
7. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan diperoleh dari sumber daya daratan (seperti hutan, tambang, dan lahan budi daya) dan sumber daya kelautan yang tersebar dalam wilayah teritorial Maluku Tenggara. Eksploitasi sumber daya di darat terutama hutan dan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan bagi kepentingan pembangunan, perlu dilakukan dengan bijaksana sehingga tidak merusak keseimbangan ekosistem dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dimasa datang diperkirakan akan terjadi krisis air, yang disebabkan oleh memburuknya kondisi hutan dan deforestasi yang meningkat. Deforestasi disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, pertanian/perkebunan dan perindustrian, dan pertambangan. Rendahnya keterbatasan air tawar pada pulau-pulau kecil membawa konsekuensi terhadap lambatnya perkembangan aglomerasi penduduk dan menjadi kendala bagi usaha ekonomi berskala besar. Pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim dan jasa kelautan yang dapat menjadi tumpuan masa depan daerah ini. Didalam pemanfaatan sumber daya alam Maluku Tenggara, tantangan yang dihadapi adalah bahwa dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir, sering bertentangan antarsektor ekonomi yang berbeda-beda baik untuk industri, rekreasi, dan pariwisata,

pengangkutan dan perhubungan, perniagaan dan perdagangan, penangkapan dan budidaya perikanan dan lain-lain. Masih terbatasnya perangkat regulasi daerah yang mengakomodir dan memfasilitasi akses masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, dan rendahnya kapasitas kelembagaan dalam koordinasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan dan memadukan kepentingan konservasi dengan pembangunan.

8. Potensi bidang kelautan dan perikanan Maluku Tenggara yang besar jika dikelola dengan sebaik-baiknya diperkirakan di masa datang akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam 20 tahun kedepan permintaan konsumsi perikanan nasional dan internasional diperkirakan akan terus meningkat baik yang bersumber dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun demikian pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Besarnya potensi tidak diikuti dengan besarnya minat masyarakat untuk berusaha dan menjadikan bidang kelautan dan perikanan sebagai bidang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Oleh sebab itu produksi perikanan masyarakat rendah, baik perikanan tangkap maupun budi daya. Apalagi jika dikemudian hari pasar dunia lebih berorientasi pada konsumsi perikanan budidaya ketimbang perikanan tangkap. Disisi lain praktek-praktek *illegal fishing* dan cara-cara pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang merusak ekosistem masih terus berlangsung. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen masyarakat di daerah ini.
9. Walaupun saat ini konsumsi pangan lokal telah dikonversi ke produk bukan lokal terutama beras, namun peningkatan produktivitas pangan lokal tetap menjadi perhatian utama dalam rangka penganekaragaman pangan daerah dan sekaligus untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis pangan dimasa datang. Produksi pertanian, perkebunan dan peternakan lokal yang masih rendah disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani/peternak. Masih lemahnya sistem penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat. Belum tersedianya benih bermutu dan agro input yang sesuai dengan kondisi daerah di tingkat petani. Orientasi usaha tani dan ternak lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dan lebih banyak untuk jenis tanaman umur pendek. Masih rendahnya kualitas aparat pembina dan petani untuk aplikasi sistem agribisnis. Tantangan lain yang harus dihadapi di masa datang adalah pemantapan fungsi dan peranan wilayah-wilayah pengembangan terutama yang mempunyai potensi komiditas unggulan.



#### D. Sosial Budaya dan Politik

1. Perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku Tenggara saat ini telah mengarah pada tahap perdamaian berkelanjutan (*sustainable peace*) yang didasari pada sikap untuk tetap mendukung kerifan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Kai. Hingga saat ini telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan kearah keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif pasca konflik, baik disebabkan karena pendekatan manajemen keamanan dan pengamanan, juga karena kesadaran masyarakat untuk menciptakan stabilitas sosial dan keamanan. Namun demikian disadari perkembangan tersebut masih dihadapkan dengan beberapa tantangan, seperti menguatnya sentimen-sentimen etnik dan golongan dengan memanfaatkan ruang dan peluang otonomi daerah bagi kepentingan kelompok tertentu. Semangat revitalisasi institusi adat perlu direspons dengan platform yang tepat sehingga tidak menciptakan situasi yang dapat mengancam stabilitas sosial dimasa datang. Masih adanya jaringan transmisi bagi nilai-nilai ideologis sektarian yang potensial menciptakan instabilitas sosial. Masih adanya potensi reaktif dari mereka yang secara langsung mengalami korban jiwa dan harta benda pada saat konflik. Kesemuanya itu dapat saja berpotensi untuk memecahkan kembali masyarakat kedalam kelompok-kelompok berdasarkan SARA di masa datang.
2. Pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang Pendidikan tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke pendidikan yang lebih tinggi. Terkait dengan itu, tantangan lain yang masih dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai termasuk yang terkait dengan pengembangan pendidikan dan ilmu-ilmu terapan seperti laboratorium IPA, Bahasa dan Komputer yang handal dan dapat memacu kreatifitas ilmiah siswa-siswi. Selain itu, rasio dan penyebaran tenaga guru teristimewa guru bidang studi belum sebanding. Juga masih terlihat dari kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat di perkotaan dan pedesaan, antara penduduk miskin dan penduduk yang sudah mampu. Pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat, juga belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat, serta aksebilitas transportasi yang terbatas merupakan suatu masalah dalam upaya pemerataan memperoleh kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh mutu pendidikan.
3. Di bidang Kesehatan tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan status kesehatan penduduk. Hal ini diakibatkan oleh rasio jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan dan sarana/prasarana yang masih jauh dari harapan tercapainya pelayanan kesehatan berkualitas. Disamping itu, sungguhpun telah tersedia Puskesmas dan

jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, namun demikian pemerataan dan keterjangkauan pelayanan masih saja dihadapkan dengan kendala biaya dan jarak transportasi. Demikian halnya dengan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama didaerah pedesaan dan terpencil, masih sangat terbatas. Selain itu rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan masyarakat maupun kesadaran berperilaku bersih dan sehat. Tingginya angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan kasus balita dengan status gizi buruk, penyebab utamanya adalah masih terbatasnya pemenuhan sanitasi kesehatan dasar, sehingga menimbulkan tiga keterlambatan, yaitu terlambat keluarga mengambil keputusan, terlambat merujuk ke tempat pelayanan kesehatan, dan terlambat mendapat pelayanan kesehatan. Untuk menangani masalah ini perlu terus didorong peningkatan kualitas Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar). Selain itu peningkatan fungsi dan kinerja pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit masih perlu dilakukan. Untuk mewujudkan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan yang berkualitas maka tantangan yang dihadapi adalah penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai serta tenaga dokter, tenaga medis dan keperawatan yang profesional.

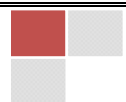
4. Pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang masalah sosial serta ikut mengentaskan kemiskinan. Dalam 20 tahun kedepan pembangunan kesejahteraan sosial masih akan dihadapkan dengan tantangan rendahnya tingkat pendidikan, keterisolasian dan keterbelakangan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang penanganan penyandang masalah sosial dan lain-lain.
5. Dalam rangka peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan maka pemecahan disparitas gender harus terus dilakukan, didasarkan atas pemahaman tentang perlunya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal penting yang mendesak untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menyusun *gender disparity index* (GDI). Tantangan lain adalah seberapa besar akses perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkup keluarga, masyarakat dan pemerintahan, termasuk keterlibatan perempuan di dalam partai politik. Menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan *gender empowerment index* (GEI) di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu kekerasan dalam keluarga juga harus terus ditekan, pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses juga oleh kaum perempuan, karena kebodohan merupakan penyebab utama ketidakberdayaan perempuan.
6. Pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan diperkirakan akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengingat Maluku Tenggara memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup beragam, serta kecenderungan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara. Sehubungan dengan itu tantangan yang harus dihadapi adalah perlu difungsikannya Asosiasi dunia usaha bidang

Industri dan Jasa Pariwisata yang merupakan mitra pemerintah daerah, meningkatkan akses informasi/promosi pariwisata daerah, meningkatkan kapasitas sarana/prasarana dan SDM pengelola industri pariwisata, serta terus mendorong tumbuh dan berkembangnya minat, apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan budaya daerah untuk tujuan pengembangan pariwisata daerah.

7. Politik dan demokrasi di Maluku Tenggara memang berkembang dengan luar biasa, tetapi belum diikuti dengan pengembangan budaya politik yang bebas dari pahan paternalistik, serta pendidikan politik rakyat yang belum berkembang secara efektif, sehingga potensi-potensi yang terdapat dalam masyarakat belum bisa digerakkan secara optimal. Di sisi lain ada kecenderungan menguatnya sifat elit dalam tatanan politik lokal, rendahnya kualitas komunikasi politik antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik, serta adanya ruang bagi kekuatan politik lokal yang berkecenderungan memanfaatkan isu-isu lokal yang bersifat sektarian.
8. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Maluku Tenggara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, dan semakin kondusif, baik karena manajemen keamanan dan pengamanan yang diterapkan semakin profesional, juga karena semakin baiknya kesadaran masyarakat untuk ikut mendukung terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban. Walau demikian kedepan masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti ; persoalan batas tanah dan atau petuanan antarwarga atau desa/dusun yang disebabkan karena penguasaan atau pemilikan hak atas tanah tanpa disertai tanda-tanda permanen sebagai batasnya; Persaingan dalam merebut akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang bernilai tinggi; Benturan-benturan ideologis akibat perbedaan kepentingan politik terutama yang disemangati oleh sentimen etnik dan agama; dan berbagai penyakit sosial seperti perjudian, minuman keras, psykotropika, tindakan asusila, tindakan kriminal yang dapat memicu kerawanan dan bahkan pertentangan antar warga/desa/dusun.

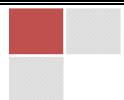
#### **E. Sarana Prasarana**

1. Pembangunan bidang Perhubungan dan transportasi di Maluku Tenggara selama ini dinilai belum memadai, karena belum memberikan kemudahan aksesibilitas wilayah terutama antara daerah pedesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan belum memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Dalam 20 tahun kedepan, diharapkan dapat dikembangkan sektor perhubungan dan transportasi yang efisien, efektif, terjangkau, dan berkelanjutan sehingga memberikan kemudahan bagi aksesibilitas di daerah dan semakin memadainya pelayanan sosial dasar dan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, perlu disusun sistem transportasi lokal yang efisien, efektif dan terintegrasi antarmoda perhubungan laut, transportasi perhubungan udara, dan darat beserta infrastrukturnya, untuk membuka keterisolasian daerah sekaligus untuk mendukung pergerakan barang dan



jasa berdasarkan konsep gugus pulau dan pintu jamak. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah perlu meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang terpadu antara transportasi darat, laut dan udara, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, meningkatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, dan meningkatkan iklim kompetisi yang sehat dibidang pelayanan jasa transportasi.

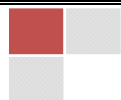
2. Dalam 20 tahun kedepan kebutuhan pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, serta komitmen Pemerintah Daerah untuk membuka aksesibilitas perhubungan untuk mengurangi keterisolasian dan kesenjangan antarwilayah. Pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan terus diupayakan terutama untuk membuka jalur transportasi darat yang menghubungkan seluruh desa-desa di Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil dan beberapa Pulau lainnya. Dalam pada itu, tantangan yang dihadapi adalah belum ditetapkannya ruas-ruas jalan provinsi di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarakan Tata Ruang Wilayah Provinsi, kondisi geografis dan topografis kepulauan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, masih terbatasnya sumber daya, peralatan maupun kualitas kinerja penyedia barang dan jasa, berdampak pada keterlambatan pekerjaan sesuai target waktu dan sasaran pekerjaan, maupun kualitas pekerjaan yang dihasilkan, serta keterbatasan sumber daya aparatur sebagai perencana, pelaksana dan pengendalian kegiatan.
3. Kebutuhan Permukiman di Maluku Tenggara dalam 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus meningkat dengan pesat terutama di perkotaan, sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pemerintahan dan perekonomian yang terus terjadi. Dengan demikian kebutuhan lahan untuk perumahan akan terus bertambah, termasuk sarana prasarana permukiman dan perkotaan yang juga membutuhkan kecermatan dalam penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Kebutuhan Air Bersih dipastikan akan terus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk dan tumbuhnya pemukiman-pemukiman baru terutama di perkotaan, sementara di pedesaan bencana kekeringan yang sering terjadi menyebabkan kelangkaan air bersih terutama di pulau-pulau kecil yang sangat rendah daerah tangkapan airnya. Sementara itu, kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Dengan demikian tantangan yang masih harus dihadapi adalah terutama meningkatkan kapasitas Jasa PDAM, termasuk didalamnya kemampuan manajemen perusahaannya. Khusus untuk kebutuhan air minum perkotaan, jasa pengelolaan air minum PDAM masih dihadapkan dengan sarana prasarana yang termakan usia yang menyebabkan tingkat kebocoran yang tinggi.



5. Kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik dipastikan akan terus meningkat dalam 20 tahun kedepan, baik untuk kebutuhan masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan, sementara pasokan atau kapasitas terpasang masih terbatas dan hanya mampu melayani masyarakat di wilayah perkotaan, dan di beberapa wilayah terpencil dan terisolir masih mengalami krisis tenaga listrik. hal ini merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai upaya penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga listrik baik oleh Pemerintah maupun swasta, dengan kemungkinan pengembangan tenaga listrik tenaga surya dan angin yang ramah lingkungan untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik pedesaan dan pulau-pulau kecil.
6. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang tinggi dan dapat mendorong percepatan pembangunan suatu daerah. Dalam 20 tahun kedepan kebutuhan untuk mengakses informasi baik oleh pemerintah daerah maupun swasta dan masyarakat dipastikan akan meningkat, sementara kapasitas, jangkauan serta kualitas layanan pos dan telematika masih sangat terbatas. Dengan demikian, kedepan perluasan jangkauan pelayanan pos di seluruh kecamatan sangat diperlukan, serta perluasan jaringan telematika (internet, dan telepon digital/seluler) guna mengurangi kesenjangan akses informasi masyarakat pedesaan.
7. **Penataan ruang untuk 20 tahun kedepan harus berada dalam suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Penataan ruang yang baik harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, tidak saling bertabrakan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan. Penataan ruang diperlukan bagi arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan dan daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, dan efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang. Ketimpangan pembangunan antarwilayah terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih besar. Kebijakan penataan ruang masih belum memperhatikan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh serta daerah-daerah rawan bencana. Belum terpadunya kebijakan penataan ruang secara konsisten sesuai dengan peruntukannya antara lain kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan tumbuh cepat, dan kawasan sentra produksi (KSP) berdasarkan asas keseimbangan dan konektivitas.**

## F. Pemerintahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang terus berkembang sesuai perubahan-perubahan paradigma dan peraturan perundangan yang berlaku, terutama dalam kerangka mewujudkan *good governance*, antara lain dengan mewujudkan prinsip-prinsip demokratisasi, desentralisasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses demokratisasi harus membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pengawasan



terhadap jalannya pemerintahan. Efektifnya partisipasi masyarakat akan memungkinkan aparatur dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah tuntutan simultan untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan daerah dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dalam masyarakat sehingga dapat merespon kebutuhan pelayanan publik secara cepat, tepat, berkualitas dan manusiawi. Mengembangkan tradisi demokrasi dan partisipasi baik dalam konteks interaksi dengan lembaga legislatif daerah sebagai mitra kerja maupun dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Perkuatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur daerah secara berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) harus dapat dimanfaatkan dalam bentuk penerapan *e-government* yang selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah juga akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Selain itu, perkuatan juga perlu dilakukan terhadap lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa dalam upaya mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Dalam merespons aspirasi masyarakat tentang pemekaran wilayah Kecamatan tetap didasari pada kajian-kajian mendalam baik pada aspek teknis dan normatif pemerintahan, maupun pada aspek yang mengedepankan prinsip pemekaran wilayah pemerintahan dalam perspektif pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Intinya adalah bahwa harus memahami reorientasi pendekatan pembangunan, yaitu kebijakan pengembangan wilayah dilakukan dalam kerangka mengembangkan dan mentransformasikan keunggulan komparatif sumberdaya ekonomi wilayah menjadi keunggulan kompetitif bisnis wilayah. Dengan demikian tantangan dari sebuah kebijakan pengembangan wilayah adalah percepatan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping persoalan rentang kendali pemerintahan dan pertumbuhan kehidupan demokrasi. Setiap kebijakan pengembangan wilayah selalu diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan wilayah sedapat mungkin memperluas aksesibilitas antarwilayah pertumbuhan, sehingga daerah ini benar-benar merupakan wilayah pemerintahan yang utuh dan tumbuh dalam kesetaraan antarwilayah.
3. Penguatan dan pemberdayaan pemerintahan desa merupakan kebutuhan yang dipandang mendesak sejalan dengan perubahan-perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya penguatan dan pemberdayaan pada aspek-aspek seperti penataan desa dan dusun, penataan struktur dan organisasi pemerintahan desa, pemilihan kepala desa langsung dan pengisian jabatan-jabatan perangkat desa, dan penataan administrasi

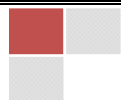


pemerintahan desa. Dalam hubungan ini kerangka regulasinya pada tataran implementatif haruslah mencakup pengaturan yang efektif mengenai wilayah petuanan dan hak-hak adatnya yang belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan potensi konflik terhadap penggunaan kepemilikan tanah dan pengelolaan sumberdaya alam, fungsionalisasi lembaga adat untuk mendukung fungsi adat dan fungsi pemerintahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta sistem dan prosedur penyelesaian sengketa adat.

4. Rendahnya penegakan supremasi hukum dikarenakan kurang berdayanya lembaga peradilan dalam mengatasi masalah hukum serta pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang terbatas. Lemahnya kesadaran hukum menyebabkan lemahnya kepatuhan hukum masyarakat. Kondisi tersebut tidak perlu terjadi apabila ada sosialisasi peraturan perundang-undangan yang semakin berkualitas kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat dicegah kesalahpahaman dalam penafsiran (*misunderstanding*) antar kelompok masyarakat maupun antara kelompok masyarakat dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tantangan lain yang dihadapi adalah membentuk sikap dan perilaku manusia dan masyarakat Maluku Tenggara yang menghormati dan menghargai hukum positif dan adat istiadat yang berlaku sehingga hukum dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan kebutuhan yang harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, serta debirokratisasi kelembagaan hukum yang memungkinkan terciptanya pelayanan hukum kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan.
5. Peningkatan kemampuan pers yang bebas dan bertanggung jawab dihadapkan pada tantangan peningkatan profesionalisme pers terutama dalam memposisikan dirinya sebagai alat kontrol sosial yang bebas dari keberpihakan terhadap kepentingan politik kelompok atau golongan tertentu.
6. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan publik yang transparan, cepat, murah, manusiawi dan berkualitas, maka tantangan penting yang harus dihadapi adalah upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, peningkatan kualitas dan profesionalisme serta etos, budaya kerja aparat yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, penetapan standar minimum pelayanan, dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik untuk mengimbangi tuntutan kebutuhan pelayanan publik.

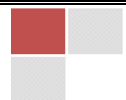
### 2.3. NILAI-NILAI STRATEGIS KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Modal Dasar dan Nilai Strategis daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang dapat dipertimbangkan dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah (RPJPD) secara umum adalah keseluruhan kekuatan daerah yang dimiliki dan dapat didayagunakan untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Namun demikian, secara khusus terdapat 5 (lima) modal dasar dan nilai strategis yakni : (1) Letak Geografis yang strategis dan terdiri dari pulau-pulau kecil; (2) Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki; (3) Besarnya kandungan potensi pertambangan (minyak bumi) yang belum tereksplorasi ; (4) Karakteristik kehidupan sosial masyarakat Maluku Tenggara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan (ain ni ain) dan mudah merespons setiap perubahan; dan (5) Kemampuan otonomi Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Daerah Otonom yang cukup mapan.

1. Letak geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari pulau-pulau kecil berbatasan dengan Provinsi Papua Barat serta sebagai pusat penghubung antara ibukota provinsi Maluku dengan kabupaten-kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara Barat, serta dengan daerah luar seperti provinsi Papua, Papua Barat, NTT, dan Jawa Timur serta terletak pada jalur Arafuru Rim yang menghubungkan antara wilayah negara Australia dengan negara-negara di Asia Pasifik.
2. Potensi sumber daya alam kelautan, perikanan dan pesisir Kabupaten Maluku Tenggara cukup tersedia untuk pengembangan sektor-sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian, jasa dan lain-lain untuk kemakmuran masyarakat serta memiliki kandungan potensi pertambangan khususnya minyak bumi yang tersedia di Pulau Kei Besar dan beberapa kali telah dicoba eksplorasi, apabila dikelola secara bertanggung jawab akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Karakteristik kehidupan masyarakat Maluku Tenggara yang religius kultural dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong serta dilandasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dapat digunakan sebagai kekuatan pendorong bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Perkembangan otonomi daerah pada tahap awal telah memberikan perubahan yang cukup mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah.



**BAB III**  
**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2005-2025**

### 3.1. VISI

Berdasarkan kondisi Daerah Maluku Tenggara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang, dan memperhatikan modal dasar atau nilai-nilai strategis yang dimiliki daerah, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku, maka visi pembangunan daerah tahun 2005 - 2025 adalah :

#### **TERWUJUDNYA MALUKU TENGGARA YANG MAJU, ADIL, DAN DEMOKRATIS DALAM MASYARAKAT YANG RELIGIUS KULTURAL**

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Visi pembangun daerah tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kehidupan religius kultural, tingkat kemajuan, serta tingkat keadilan dan demokratis yang ingin dicapai.

*Religius kultural* adalah tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur ajaran agamanya, serta menjunjung kearifan nilai-nilai budaya lokal dalam kemajemukan. Suatu tatanan masyarakat yang berakhlak mulia dalam hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya dan dengan sesama manusia, menghargai dan mengutamakan persudaraan, perdamaian dan hidup bersama, serta tetap memelihara dan melestarikan budaya lokalnya sebagai bagian integral dari budaya bangsa.

*Maju* adalah suatu keadaan yang lebih baik atau meningkat dari kondisi masa lalu dan sekarang. *Tingkat kemajuan* suatu daerah biasanya dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu daerah diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan maju apabila manusianya memiliki tingkat pendidikan yang berkualitas, yang ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan yang berkualitas dan meningkatnya angka partisipasi pendidikan. Suatu daerah dikatakan maju akan terlihat pula dari derajat kesehatan masyarakatnya yang ditandai dengan tingginya angka harapan hidup. Ditinjau dari indikator ekonomi, kemajuan suatu daerah tercermin dari tingkat pendapatan dan pemerataannya. Daerah yang maju adalah daerah yang pendapatan rata-ratanya tinggi disertai dengan pembagian yang merata, dimana sektor industri dan jasanya telah berkembang sebagai penggerak jalu pertumbuhan yang memberikan dampak baik dalam segi penghasilan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, maupun penyerapan tenaga kerja. Dalam hubungan ini maka berkembang pula keterpaduan antarsektor, terutama sektor kelautan dan perikanan, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumberdaya alam. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang maju dan berkualitas.

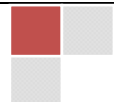
*Keadilan* harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian masyarakat yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

*Demokratis* ditandai dengan indikator meningkatnya peranserta masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sistem dan kelembagaan politik di daerah yang baik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan di daerah telah berfungsi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang telah meningkat pendidikan politiknya, masyarakat yang hak-hak dan partisipasi politiknya terjamin, dan masyarakat yang hak-hak warga, keamanannya dan ketentramannya terjamin pula. Demokratis adalah juga sebagai bentuk perwujudan komitmen untuk membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana didalamnya diharapkan akan terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

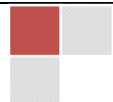
### 3.2. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertaqwa, dan berbudaya**, adalah memperkuat jati diri dan karakter sebagai masyarakat yang religius kultural melalui pendidikan dan pembinaan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama dalam interaksi sosial yang harmonis, menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memantapkan ketahanan bangsa, memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan dalam masyarakat yang religius kultural.
2. **Mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas**, adalah mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain, dengan mengutamakan pembangunan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan trampil melalui peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; meningkatkan kualitas dan relevansi ketenagakerjaan, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi; dan pemberdayaan masyarakat termasuk gender.



3. Mewujudkan perekonomian Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang tangguh dan berdaya saing adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis kelautan/perikanan dan pertanian menuju keunggulan kompetitif berbasiskan teknologi inovatif dan berdaya saing dengan membangun sistem produksi, distribusi, pelayanan jasa, membangun jejaring antar wilayah, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur ekonomi yang maju.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, adalah meningkatkan pembangunan daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi, meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah yang optimal dan handal, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum adalah membangun dan memperkuat peran dan partisipasi politik rakyat, menegakkan supermasi hukum, reformasi hukum dan regulasi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; memperkuat kualitas kemampuan otonomi; dan meningkatkan profesionalisme aparatur daerah serta kualitas pelayanan publik.





**BAB IV**  
**SASARAN, ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 -2025**

#### **4.1. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang adalah keadaan atau keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun sedangkan Arah Pembangunan Jangka Panjang adalah jalan yang ingin dipilih atau langkah-langkah yang ingin ditempuh untuk melaksanakan misi guna mewujudkan visi. Dengan demikian Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025 sebenarnya juga adalah peta jalan (*roadmap*) yang akan dituju oleh Pemerintah Daerah bersama-sama seluruh lapisan masyarakat Maluku Tenggara dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Sebagai ukuran tercapainya *Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis Dalam Masyarakat yang Religius Kultural*, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

#### **A. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERTAQWA DAN BERBUDAYA.**

Sasaran terwujudnya kondisi *masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertaqwa dan berbudaya* ditandai oleh hal-hal berikut :

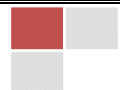
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian dalam rangka mewujudkan ciri, watak dan perilaku masyarakat Maluku Tenggara yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, menghargai pluralitas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, dan perdamaian.
2. Terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki kemampuan beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan sosial lokal, nasional dan global dengan mempertahankan identitas dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian dari kepribadian nasional, serta pengembangan budaya inovasi berorientasi iptek.
3. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menangkal munculnya paham-paham separatisme atau munculnya organisasi-organisasi yang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Semakin kondusifnya kehidupan sosial karena adanya kesadaran setiap individu warga Kabupaten Maluku Tenggara untuk hidup secara aman dan damai dalam sebuah harmoni sosial yang berkualitas.
5. Berkurangnya penyakit sosial seperti perjudian, minuman keras, penggunaan psykotropika, tindakan asusila, tindakan kriminal dan kekerasan dalam keluarga.

## B. MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU TENGGARA YANG BERKUALITAS.

Sasaran terwujudnya *Masyarakat Maluku Tenggara yang Berkualitas* ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 85 persen , dan peningkatan indeks pembangunan gender.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 100 persen, SMP/MTS sebesar 98 persen, SMA/SMK/MA sebesar 95 persen, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 98 persen, SMP/MTS sebesar 95 persen, SMA/SMK/MA sebesar 88 persen, tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai, terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan karakteristik daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dengan tercapainya Angka Hektarrapan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara 82,9 Tahun, Angka Kematian Bayi sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu Melahirkan 10 per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi gizi buruk 1 Persen, hilangnya prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), menurunnya prevalensi penyakit menular, tersedianya sarana prasarana dan alat kesehatan, serta terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas dan distribusi tenaga medis dan para medis yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan karakteristik daerah.
4. Terjaminnya pelayanan sosial para penyandang masalah sosial seperti anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat, dan orang tua jompo.
5. Tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas serta jumlah keluarga sejahtera yang semakin meningkat dan memenuhi norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, serta terwujudnya satu keluarga satu sarjana.
6. Tersedianya lapangan perkerjaan yang luas dan beragam dengan angka pengangguran tidak lebih dari 6 Persen, tercapainya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, serta sistem gaji/tunjangan yang sesuai.



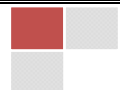


7. Tercapainya peningkatan kualitas pembinaan generasi muda, peningkatan prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional.

### C. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN MALUKU TENGGARA SEBAGAI DAERAH KEPULAUAN YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING

Sasaran terwujudnya *Perekonomian Maluku Tenggara sebagai Daerah Kepulauan yang tangguh dan berdaya saing* ditunjukkan oleh hektar-hal sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah di atas 10 persen per tahun dengan berbasis kelautan/perikanan dan pertanian yang terpadu, berkualitas, berkesinambungan dan didukung oleh teknologi inovasi sehingga pendapatan percapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah maju.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif sebagai daerah kepulauan. Sektor kelautan/perikanan, pertanian dan pariwisata mejadi basis aktivitas ekonomi daerah yang dikelola secara efisien dan optimal sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas sebagai motor penggerak perekonomian, serta sektor jasa yang peranannya semakin meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. Selain itu memberikan peluang berusaha bagi masyarakat antarpelaku ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar melalui pendekatan sistem kemitraan yang mengarah pada peningkatan peranan industri pengolahan dan jasa yang berbasis kelautan/perikanan dan pertanian dengan pengelolaan agribisnis yang tangguh.
3. Terwujudnya peningkatan peran Kelembagaan ekonomi yang efektif didukung oleh sistem keuangan (bank dan non bank), infrastruktur ekonomi yang memadai, pelaksanaan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, terbukanya akses masyarakat terhadap penyediaan modal (kredit) bagi usaha kecil dan menengah, dan meningkatnya nilai tambah yang dinikmati oleh masyarakat.
4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui jaminan regulasi daerah berupa pemberian kemudahan dan insentif (fiskal dan non fiskal) bagi peningkatan investasi melalui masuknya PMDN dan PMA. Pemberian kemudahan antara lain mempermudah pelayanan investasi yang cepat dan berkualitas. Insentif fiskal antara lain pemberian keringanan pajak/retribusi sedangkan insentif non fiskal antara lain peningkatan dan penyediaan infrastruktur wilayah yang berorientasi pada peningkatan investasi, peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh lembaga keuangan (bank dan non bank) yang memadai.
5. Meningkatnya ekspor komoditi unggulan yaitu perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi.

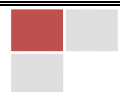


6. Meningkatnya usaha dan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan, pengembangan industri bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kemudahan akses permodalan, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana pendukung serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
7. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian yang ditandai dengan meningkatnya hasil usaha pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat yang berorientasi pada daya saing melalui pengembangan sentra-sentra komoditas unggulan, pengembangan dan penerapan teknologi pra dan pasca panen, serta pengembangan areal pertanian, perkebunan, hortikultura unggulan spesifik lokal dan peningkatan populasi ternak.
8. Terkelolanya potensi pariwisata (budaya, alam dan bahari) secara berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan wisata alam dan bahari yang berwawasan lingkungan, meningkatnya jumlah event dan paket wisata, bertambahnya obyek dan daerah tujuan wisata baru, meningkatnya kuantitas dan kualitas sumberdaya pengelola wisata, meningkatnya sarana prasarana pendukung pariwisata, serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara 100.000 orang dan wisatawan manca negara 5.000 orang pada tahun 2025.
9. Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi perdagangan dan jasa yang memadai untuk mempercepat proses produksi, distribusi, promosi, dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah.
10. Terwujudnya koperasi, usaha kecil dan mikro serta industri kecil, menengah yang tangguh dan berdaya saing sebagai soko guru perekonomian lokal.

#### D. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKEADILAN

Sasaran terwujudnya *Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan di Maluku Tenggara* ditandai dengan hektar-hal berikut :

1. Tingkat pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, meningkatnya keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan, serta meningkatnya akses dan keterkaitan antar pulau-pulau kecil.

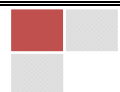


2. Terbangunnya sistem dan jaringan infrastruktur daerah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Maluku Tenggara dengan dukungan jaringan sarana prasarana perhubungan dan transportasi antarpulau yang memadai, handal, dan terintegrasi satu sama lain.
3. Menurunnya proporsi penduduk miskin di bawah 10 persen melalui peningkatan kualitas program dan volume kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan dan meningkatnya aksesibilitas pelayanan kebutuhan dasar antara penduduk perkotaan, pedesaan dan pulau-pulau kecil yang terpencil.
5. Menurunnya angka kerusakan lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir, berkurangnya intensitas bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, serta berkurangnya risiko dan dampak kerusakan akibat bencana alam.
6. Mewujudkan Maluku Tenggara yang asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara seimbang sekaligus untuk melestarikan sumber daya hutan, bertambahnya luas daerah tangkapan air, meningkatnya luas lahan produksi dan berkurangnya luas lahan kritis dari 67.371,70 hektar menjadi hanya 5.000 hektar.

#### **E. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM**

Sasaran terwujudnya *Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum* ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan politik rakyat, yang tercermin oleh peningkatan peran, partisipasi politik rakyat, serta terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan.
2. Tercapainya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta tertatanya sistem regulasi daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, akomodatif dan partisipatif.
3. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas yang didukung oleh aparaturnya yang profesional, trampil, berwawasan luas, menguasai bidang tugasnya, berwibawa, berdedikasi dan berakhlak mulia, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
4. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 100 miliar melalui kebijakan-kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-



sumber pendapatan sehingga tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah pada pemerintah menjadi hanya sekitar 80 persen.

5. Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, yang berorientasi pada kemudahan rantai birokrasi, cepat, tepat, efektif, transparan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

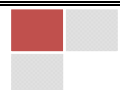
#### 4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

##### A. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERTAQWA DAN BERBUDAYA.

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertaqwa dan berbudaya bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan hektarrmonis. Di samping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya masyarakat adat dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai budaya.

Untuk mencapai sasaran diatas, maka Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada bidang-bidang yang terkait dengan pencapaian misi *Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Bertaqwa dan Berbudaya* adalah :

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan hektarrmoni sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
2. Pembangunan budaya diarahkan untuk pengembangan suatu tatanan masyarakat Maluku Tenggara yang menghargai dan melestarikan identitas dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian integral dari kepribadian nasional, serta memiliki kemampuan beradaptasi dan merespons setiap perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi.
3. Pembangunan bidang sosial budaya juga diarahkan untuk memantapkan dan terus meningkatkan peran institusi agama, institusi sosial dan kebudayaan masyarakat secara intensif dan simultan, serta memantapkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal yang mengakomodir prinsip keadilan dan demokrasi sebagai modal sosial (*social capital*) yang kontributif bagi pembangunan daerah.
4. Budaya inovatif yang berorientasi iptek perlu dikembangkan agar masyarakat Maluku Tenggara menguasai iptek serta mampu berjaya dalam persaingan nasional maupun global melalui pengembangan budaya membaca dan



menulis, masyarakat pembelajar, serta masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif.

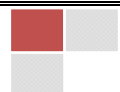
5. Pembangunan kesenian daerah diarahkan untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional daerah sebagai bagian dari jati diri masyarakat Maluku Tenggara dan sekaligus sebagai aset budaya lokal dalam rangka pengembangan pariwisata daerah.
6. Pembangunan moral kebangsaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara dalam rangka menangkal segala bentuk ancaman, hambatan dan tantangan di daerah, sehingga terwujudnya ketahanan bangsa dan kehidupan berbangsa/bernegara yang mantap dan berkelanjutan.
7. Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemberantasan penyakit masyarakat seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, dan lain-lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

## B. MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU TENGGARA YANG BERKUALITAS.

Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas adalah syarat mutlak bagi peningkatan daya saing di bidang pendidikan, kesehatan, penerapan IPTEK, kesejahteraan sosial, peran serta perempuan dalam pembangunan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tercermin pada kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang ditunjang dengan kebijakan anggaran yang lebih berpihak.

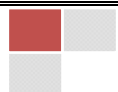
Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada bidang-bidang yang terkait dengan pencapaian misi *Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara yang Berkualitas* tersebut adalah :

1. Pembangunan kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Maluku Tenggara yang maju dan berdaya saing. Pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas manusia Maluku Tenggara yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang belajar yang memadai, peningkatan kualitas, kompetensi dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan manajemen pendidikan yang berkualitas, perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan, penyediaan layanan



pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta turut mendorong penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.

3. Penerapan iptek diarahkan pada penyediaan sistem informasi dan teknologi terutama untuk mendukung upaya pembangunan di sektor kelautan/perikanan dan pertanian, serta sektor lainnya antara lain sektor pariwisata, transportasi, energi, telekomunikasi, industri, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, upaya pengembangan SDM Iptek diarahkan pada peningkatan anggaran riset dan kebijakan riset yang dibutuhkan antara lain dalam bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi, berbagai lembaga penelitian dan dunia usaha pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
4. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas melalui : peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang, peningkatan kualitas gizi penduduk terutama bayi, balita, ibu hektarmil, perempuan dewasa dan manusia lanjut usia (Manula); penyediaan dan peningkatan tenaga medis dan paramedis yang menunjang baik dari segi jumlah, mutu dan penyebaran; peningkatan dan pengembangan kesehatan dasar yang lebih bermutu; peningkatan kapasitas sarana prasarana dan peralatan kesehatan; penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan asuransi kesehatan bagi keluarga miskin; pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; serta pengembangan layanan rumah sakit rujukan yang memadai dan berkualitas. Sedangkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah diarahkan untuk menjadi pusat rujukan yang profesional, dengan kualitas layanan yang memadai.
5. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui penguatan peran lembaga sosial lokal, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan termasuk keterlibatan dalam partai politik, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan diberbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
7. Pembangunan bidang keluarga berencana diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; pengendalian laju pertumbuhan penduduk; serta menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Pembangunan bidang kependudukan dalam rangka pengendalian dan penataan penyebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan/pulau melalui



pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memperhatikan kondisi karakteristik wilayah serta pembangunan berkelanjutan.

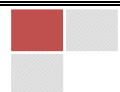
8. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan sebanyak-banyaknya lapangan kerja terutama pada sektor-sektor primer seperti kelautan/ perikanan dan sektor lainnya; meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; penerapan upah minimum regional (UMR); hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dan perusahaan; keselamatan kerja yang memadai; serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang memuaskan semua pihak. Selain itu untuk meningkatkan produktifitas kerja maka diharapkan peningkatan komposisi pendidikan angkatan kerja serta peningkatan mutu dan ketrampilan melalui kualifikasi pendidikan/pelatihan angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
9. Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya dan kesadaran politik generasi muda serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan, solidaritas dan karakter kebangsaan (*nation building*)
10. Pembangunan olahraga dalam rangka meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta penyelenggaraan *event - event* olahraga minat, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

### C. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN MALUKU TENGGARA SEBAGAI DAERAH KEPULAUAN YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING.

Terwujudnya perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang tangguh dan berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing yang tinggi akan menjadikan daerah siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, dalam jangka panjang pembangunan daerah diarahkan antara lain untuk perubahan dan penguatan struktur perekonomian; peningkatan laju pertumbuhan ekonomi; peningkatan investasi dan ekspor; peningkatan peran lembaga-lembaga keuangan (bank dan non bank) secara optimal; peningkatan produksi sektor unggulan kelautan/perikanan, pertanian, perkebunan kepulauan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya.

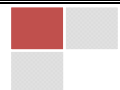
Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada bidang-bidang yang terkait dengan pencapaian misi *Mewujudkan Perekonomian Maluku Tenggara sebagai Daerah Kepulauan yang Tangguh dan Berdaya saing* adalah :

1. Pembangunan bidang perekonomian diarahkan pada perubahan perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif berbasiskan teknologi inovasi dengan pemanfaatan sumber daya



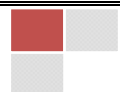
kepulauan yang tersedia dan memiliki potensi ekonomis yang tinggi seperti kelautan dan perikanan, perkebunan kepulauan, dan pariwisata.

2. Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian sebesar 10 persen per tahun melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi (produksi, distribusi dan pemasaran) yang terintegrasi, peningkatan produksi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan ekspor komoditas unggulan. Untuk maksud tersebut diperlukan dukungan politik (*political will*) dan kebijakan dari unsur pimpinan daerah (Pemerintah daerah dan DPRD) dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara lain melalui kebijakan regulasi, standarisasi dan pengendalian kualitas.
3. Penguatan struktur perekonomian dengan mendorong sektor kelautan/perikanan, perkebunan kepulauan dan pariwisata sebagai motor penggerak yang didukung oleh sektor pertanian dan sektor lainnya yang menghasilkan produk-produk secara efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan yang efektif agar terwujudnya ketahanan ekonomi daerah yang tangguh.
4. Dalam rangka upaya peningkatan perekonomian daerah maka lembaga-lembaga keuangan perlu didorong agar memiliki kemampuan optimal untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah yang berkualitas dan memiliki daya tahan terhadap gejolak krisis, dan memberikan kontribusi dalam pendanaan pembangunan daerah. Dengan berperannya lembaga-lembaga keuangan maka semakin beragam pula alternatif dan jenis pendanaan pembangunan, sehingga akan terjadi beragam jenis investasi dan komoditi ekspor yang dapat menumbuhkembangkan sektor riil sebagai kekuatan ekonomi daerah.
5. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan konsumsi pasar lokal, nasional dan internasional melalui peningkatan sarana dan prasarana; pengembangan perikanan tangkap dan budidaya dengan tetap menjaga potensi lestari; peningkatan kuantitas dan kualitas SDM; dan pemanfaatan teknologi tepat guna bidang kelautan dan perikanan. Selain itu pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya pengurangan dampak *illegal fishing* dan pengrusakan ekosistem laut dan pesisir dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pembangunan, pengelolaan dan pengawasan bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak adat dan kearifan lokal.
6. Pembangunan bidang pertanian tanaman pangan diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan lokal melalui penerapan teknologi tepat guna; peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani; revitalisasi sistem penyuluhan pertanian; penyediaan benih bermutu dan agro input lainnya yang sesuai dengan kondisi daerah untuk meningkatkan usaha tani pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu untuk mengurangi tekanan dan ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap beras perlu ditingkatkan diversifikasi pola pangan yang berbasis pada komoditas pangan lokal;





7. Pembangunan bidang perkebunan diarahkan pada peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas perkebunan kepulauan melalui peremajaan dan perluasan areal perkebunan; peningkatan kapasitas sistem penyuluhan; perbaikan sistem perbenihan; penanggulangan hama/penyakit tanaman perkebunan; mengubah kebiasaan masyarakat dari sistem meramu menjadi sistem pertanian produktif; memberikan kemudahan permodalan bagi usaha di bidang perkebunan; dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
8. Pembangunan bidang hortikultura diarahkan pada peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas hortikultura khususnya buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan fitofarmaka (tanaman obat) melalui perbaikan teknik budidaya; perbaikan sistem perbenihannya; penanggulangan hama/penyakit tanaman hortikultura; kemudahan permodalan bagi usaha di bidang hortikultura; dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
9. Pembangunan peternakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan protein hewani lokal melalui peningkatan populasi ternak; perbaikan sistem perbibitan ternak; perbaikan kelembagaan kesehatan hewan; revitalisasi sistem penyuluhan di bidang peternakan; penerapan teknologi pengolahan pakan ternak bersumber dari bahan lokal; integrasi horizontal usaha perkebunan dan peternakan; dan kemudahan permodalan bagi usaha di bidang peternakan.
10. Pembangunan bidang pariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Maluku Tenggara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah wisata bahari secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya lokal. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan pelaku industri pariwisata dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata; pengembangan objek; peningkatan akses menuju objek, event dan paket wisata; sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata bagi masyarakat; dan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata.
11. Pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri yang berbasis sumber daya lokal (agroindustri berbasis kelautan/ perikanan dan pertanian) dan industri lainnya melalui perluasan/pengutuhan skala usaha; kemudahan akses pelaku terhadap modal, teknologi, pasar; dan peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaku usaha di bidang perindustrian.
12. Pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada terwujudnya sistem perdagangan antarpulau yang efisien dan efektif melalui peningkatan kapasitas infrastruktur perdagangan, pemerataan pengembangan sentra-sentra perdagangan, penataan regulasi dan deregulasi di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat,



terjaminnya ketersediaan bahan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau; serta terjaminnya pengembangan ekspor komoditas unggulan daerah yang berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional.

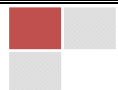
13. Pembangunan bidang koperasi didorong untuk mengembangkan sektor unggulan di daerah sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata sebagai soko guru pembangunan ekonomi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
14. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi pilihan yang strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. Sehubungan dengan itu pembangunan usaha mikro, kecil dan Menengah diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin inovatif dan berdaya saing. Kondisi itu dicapai melalui peningkatan kompetensi, perkuatan kewirausahaan dan produktifitas yang didukung dengan peningkatan akses pasar, pemanfaatan teknologi inovasi serta pengembangan wirausaha baru.

#### D. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

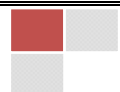
Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat pedesaan, perkotaan dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah, mengurangi potensi risiko kebencanaan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada bidang-bidang yang terkait dengan pencapaian misi *Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan* adalah :

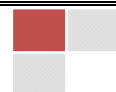
1. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan wilayah perkotaan, perdesaan dan pulau-pulau kecil. Pembangunan perkotaan diarahkan sebagai simpul koleksi, distribusi komoditas unggulan, pusat pelayanan jasa dan perdagangan serta penyediaan pelayanan sarana prasarana dasar perkotaan. Pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan sentra-sentra produksi kelautan/perikanan dan pertanian, dan pelayanan sarana prasarana dasar sekaligus sebagai wilayah penyangga (*hinterland*) bagi daerah perkotaan. Sedangkan pembangunan pulau-pulau kecil diarahkan pada pengembangan sentra-sentra kelautan/perikanan (tangkap dan budidaya), perkebunan kepulauan dan pariwisata.
2. Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk membuka aksesibilitas



- perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan ruas-ruas jalan baru dan jembatan di pedesaan dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum terjangkau; peningkatan kapasitas dan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan; pembangunan dan pemeliharaan dermaga, pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan rakyat; pembangunan lapangan terbang yang representatif untuk mendukung terintegrasinya sistem perhubungan antarmoda.
3. Pembangunan bidang perhubungan diarahkan memberikan kemudahan aksesibilitas orang, barang dan jasa dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara maupun ke luar wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan demikian berarti memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi seperti itu dapat dicapai melalui pengembangan sistem transportasi lokal yang efisien, efektif, handal dan terintegrasi antar moda perhubungan laut, darat dan udara beserta infrastrukturnya; meningkatkan peran kerja sama pemerintah dan swasta dalam pelayanan transportasi publik; serta penciptaan iklim kompetitif yang sehat di bidang transportasi.
  4. Peningkatan sistem hubungan interkoneksi antarkota Kecamatan dan pusat kabupaten maupun dengan kota Provinsi melalui pengembangan jaringan transportasi darat prioritas utama yaitu pengembangan jaringan jalan antarkecamatan serta antar ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten. Hal yang sama juga dilakukan melalui pemangunan jaringan moda transportasi laut dan penyeberangan yang cepat dan lancar dari dan ke pulau Kei Besar. Pembangunan moda transportasi yang aman dan lancar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, lintas kabupaten/kota, kabupaten dengan pusat-pusat pelayanan di kecamatan dan desa-desa terpencil harus menjadi bagian penting pembangunan infrastruktur wilayah.
  5. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi melalui penyediaan jangkauan dan kualitas pelayanan pos diseluruh kecamatan dan perluasan jaringan telematika (telepon, penyiaran, fasilitas internet dan lain-lain) untuk diakses oleh masyarakat.
  6. Pembangunan sarana parasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah secara memadai, pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik memberikan peluang bagi investasi swasta, terutama untuk wilayah non komersial. Pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru bersumber dari tenaga surya dan angin terutama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan ketenagalistrikan di wilayah perdesaan terpencil dan pulau-pulau kecil.
  7. Pembangunan sumberdaya air diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan sarana dan parasaran sumberdaya air bersih terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan di pulau-pulau kecil; penyediaan air baku bagi kebutuhan sektor terkait seperti pertanian, industri, perdagangan,

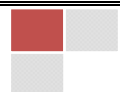


- transportasi, pariwisata, dan jasa lainnya; termasuk peningkatan kemampuan manajerial Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi dan pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan lainnya, mengurangi luas areal lahan kritis serta mencegah dan memberantas penebangan liar (*illegal cutting*).
  9. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup senantiasa harus diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan menjadi syarat utama yang diimplemetasikan ke dalam kebijakan pembangunan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta partisipasi dan kearifan budaya lokal, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan.
  10. Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pengaturan Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Tata Ruang Nasional yang meliputi : **Kawasan Andalan** yakni terdiri dari Tahapan Pengembangan Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan, Tahapan Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian, Tahap Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan, Tahap Pengembangan Kawasan Andalan Perkebunan, Tahap Pengembangan Kawasan Andalan Industri Pengolahan; **Kawasan Lindung** yang terdiri dari Kawasan Lindung Tahapan Pengembangan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Masbait dan Kawasan Lindung Tahapan Pengembangan Cagar Alam Daab; serta **Kawasan Pengembangan Air dan Sungai** yakni Kepulauan Kei - Aru termasuk dalam Kawasan Tahapan Pengembangan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang, dan efektifitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
  11. Pembangunan perkotaan dilaksanakan terutama dalam rangka pengembangan sistem jaringan sarana prasarana perkotaan yang meliputi upaya untuk (a) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan seperti jalan kota, air bersih, persampahan, drainase, air limbah, listrik dan telekomunikasi secara terpadu dalam rangka pemantapkan fungsi kota; (b) menjamin keberlanjutan pelayanan sarana prasarana kota sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk kota; dan (c) mempertahankan kualitas lingkungan kota dari pencemaran, untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang asri. Pembangunan dan



pengelolaan sarana prasarana perkotaan perlu didukung melalui pengembangan kerja sama dengan pihak swasta.

12. Pembangunan perkotaan dengan prinsip-prinsip antara lain, melibatkan *stakeholders* kota, bertumpu pada budaya lokal yang spesifik, sehingga kota berkembang atas landasan budaya dan mempunyai jatidiri yang mantap serta mencerminkan keadilan sosial (*social justice*) melalui mekanisme dan kapasitas pelayanan perkotaan serta peningkatan produktivitas perkotaan dalam kerangka pengembangan ekonomi perkotaan dan ekonomi wilayah yang lebih luas.
13. Pembangunan perkotaan dan infrastruktur didorong untuk dilaksanakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private-community partnership*), dengan penguatan peran swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan wilayah dan kota, sedangkan peran pemerintah adalah pendorong dan penggerak pembangunan yang dilakukan oleh komponen-komponen dalam masyarakat.
14. Pembangunan bidang perumahan dan sarana prasarana pendukung diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas; penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan dunia usaha. Untuk memenuhi kebutuhan lahan permukiman di wilayah perkotaan dilakukan melalui pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) maupun Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).
15. Secara geografis Maluku Tenggara berada di wilayah yang rawan bencana yaitu pada wilayah pertemuan 3 lempeng tektonik. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemampuan dan penerapan sistem mitigasi bencana; peningkatan sumberdaya manusia di bidang mitigasi bencana; sosialisasi dan desiminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat; identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini.
16. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat, pemberian perlindungan dan perhatian yang lebih besar untuk kelompok masyarakat di wilayah perdesaan, penguatan kelembagaan masyarakat perdesaan dan penguatan pemerintahan desa.
17. Dalam rangka pembangunan berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan, perlu perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana. Pengentasan Kemiskinan dilakukan melalui sistem perlindungan dan jaminan sosial dengan memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Disamping itu perlu



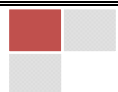
dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas keluarga miskin untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi riil.

#### E. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

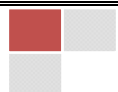
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui peningkatan peran pemerintah dan etika demokrasi; peningkatan pemberdayaan sumber daya aparatur; peningkatan kesadaran hukum; penataan kerangka regulasi daerah dan penguatan pemerintahan desa; penguatan sistem informasi manajemen kependudukan; peningkatan penataan sistem administrasi pertanahan; peningkatan pendapatan daerah; peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan; peningkatan pelayanan publik; serta membangun sistem penyediaan, penyajian data dan informasi yang akurat dan mutakhir.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut maka Arah Pembangunan Jangka Panjang pada bidang-bidang yang terkait dengan misi *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum* adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan politik diarahkan pada perwujudan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pembentukan kemandirian dan kedewasaan politik; penataan proses politik melalui peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik dalam rekrutmen para pejabat politik dan pejabat publik; pengembangan budaya politik melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis dan upaya mewujudkan wacana dialog mengenai pentingnya memelihara persatuan; serta pengembangan pendidikan politik rakyat.
2. Pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi melalui peningkatan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam proses pengambilan keputusan dan sosialisasi peraturan perundangan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi harus didukung oleh pelayanan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, profesionalisme aparat penegak hukum dan proses hukum yang tidak berbelit serta penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
3. Pembangunan sumberdaya aparatur diarahkan pada restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi kelembagaan aparatur di daerah; peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik; penerapan teknologi informasi; dan perlu adanya *merit* sistem yang adil.
4. Pembangunan otonomi daerah diarahkan pada penguatan kelembagaan pemerintahan daerah; pengembangan hubungan kemitraan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) yang lebih harmonis; serta penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilahan yang lebih efektif, efisien, dan proporsional.



5. Pembangunan pemerintahan desa diarahkan pada penguatan dan pemberdayaan organisasi perangkat pemerintahan desa melalui kerangka regulasi daerah yang mencakup fungsionalisasi lembaga adat dalam pemerintahan desa, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam desa, serta sistem dan prosedur penyelesaian sengketa adat; penataan administrasi pemerintahan desa; peningkatan kemampuan aparat pemerintahan desa; dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
6. Kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada penerapan sistem informasi manajemen kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan menjamin kepastian status, hak dan kewajiban setiap warga.
7. Pembangunan bidang pertanahan dilaksanakan dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hektark atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Untuk menyempurnakan penegakan produk hukum pertanahan di daerah perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kedudukan hukum positif dan hukum adat dalam konteks kepemilikan hektark adat dan penyelesaian sengketa tanah dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat (hak ulayat), serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu perlu dilakukan tertib administrasi dan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah.
8. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Kebijakan intensifikasi diarahkan melalui optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang tersedia serta dengan prinsip berkelanjutan. Kebijakan ekstensifikasi dan diversifikasi diarahkan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru tanpa memberatkan pelaku usaha dan menghambat aliran investasi. Perbaikan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kebijakan regulasi dan pengelolaan sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatannya dalam rangka perwujudan *good governance*.
9. Perencanaan pembangunan diarahkan untuk merumuskan arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua bidang/sector melalui peningkatan koordinasi antarbidang/sector dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
10. Pengawasan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional, serta peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan melekat dalam sistem pengendalian manajerial internal,
11. Pengembangan pelayanan publik diarahkan pada terwujudnya sistem pelayanan publik yang mencerminkan prinsip-prinsip kemudahan, transparan, cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pelayanan publik satu atap (*one stop*



*services*); peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pelayanan publik, serta kerangka regulasi daerah yang mendukung.

12. Statistik daerah diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, penyajian data dan informasi yang akurat dan mutakhir serta mudah diakses oleh masyarakat dan bermanfaat bagi informasi serta acuan perencanaan pembangunan daerah.

#### 4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2005 - 2025

Untuk mencapai sasaran pokok yang sebagaimana di atas, pembangunan jangka panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

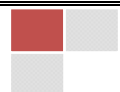
Setiap sasaran pokok dalam lima misi pembangunan jangka panjang daerah dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan kembali menjadi prioritas utama yang menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut di atas maka terdapat lima tahapan dan prioritas utama pembangunan daerah jangka menengah.

##### 4.2.1 RPJMD Ke-1 2003 - 2008

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD pertama diarahkan untuk menata kembali dan membangun Maluku Tenggara di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Maluku Tenggara yang aman dan damai yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraannya meningkat.

Maluku Tenggara yang aman dan damai ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya semangat persatuan dan kekeluargaan dalam keberagaman berdasarkan asas Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini didukung oleh semakin tertanganinya berbagai kerawanan dan konflik sosial serta semakin berkembangnya penerapan nilai-nilai agama yang positif, produktif, pada setiap aspek kehidupan, serta menguatnya pemahaman dan pengamalan identitas lokal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi "*ain ni ain*" dan "*vuut ain mehe ni ngifun, manut ain mehe ni tilur*".

Maluku Tenggara yang adil dan demokratis ditandai dengan semakin meningkatnya keadilan dan penegakan hukum, terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi lokal, meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, semakin tertatanya kerangka regulasi daerah, semakin meningkatnya





kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, serta tertatanya kelembagaan demokrasi di daerah dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Pada aspek kesejahteraan, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia, membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi ini dicapai dengan mendorong perbaikan berbagai infrastruktur daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan terbukanya akses pelayanan kebutuhan dasar yang semakin membaik. Membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup ditandai dengan semakin membaiknya penanganan rehabilitasi lahan kritis dan semakin tertatanya regulasi dan pengendalian dampak lingkungan.

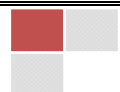
#### 4.2.2 RPJMD Ke-2 2008 - 2013

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Maluku Tenggara di segala bidang dengan menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing ekonomi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antara kelompok masyarakat dan antarwilayah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat.

Daya saing perekonomian daerah ditandai dengan penguatan pembangunan yang berbasis kelautan/perikanan, pertanian, dan pariwisata secara terpadu sesuai potensi dan karakteristik daerah yang diikuti dengan peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Upaya tersebut perlu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar moda darat, laut dan udara, peningkatan pemanfaatan energi dan kelistrikan, pengembangan sumber daya air, serta pengembangan perumahan dan permukiman.

Dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup semakin mantap



melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konversi sumber daya alam dan lingkungan hidup, menguatnya partisipasi aktif masyarakat, terpeliharanya keanekaragaman hektaryati dan kekhasan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah serta modal pembangunan di masa mendatang, mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif dalam penanggulangan bencana, serta terlaksananya pembangunan kelautan/perikanan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

#### 4.2.3 RPJMD Ke-3 2013 - 2018

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

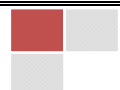
Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri kelautan dan perikanan, pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah kepulauan ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik dan telekomunikasi yang hektarndal dan efisien sesuai kebutuhan; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air termasuk penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan itu pemenuhan kebutuhan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.

#### 4.2.4 RPJMD Ke-4 2018 - 2023

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang religius kultural, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan berbasis teknologi inovatif di berbagai sektor dan wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik, supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman



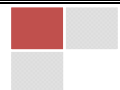
dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri; serta terwujudnya kemandirian lokal dalam konstelasi nasional dan global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan daerah, sumber daya manusia daerah diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berahklak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila dan budaya lokal yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Maluku Tenggara yang beragama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi IPTEK.

Kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat lebih mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata serta sektor lainnya. Kelembagaan ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan IPTEK yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktifitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah yang berpendapatan tinggi dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang terintegrasi untuk menjangkau wilayah kepulauan dan melayani seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hektaryati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah serta sebagai modal pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara pada masa yang akan datang.





## BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

RPJPD ini mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Maluku, dan menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu sebagai pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya, yang akan ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Terwujudnya *Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural* sesungguhnya perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakan dari setiap kepala daerah selama 20 tahun; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Maluku Tenggara. Amin

